

**EKSISTENSI PUSAT DOKUMENTASI DAN INFORMASI ACEH
TERHADAP PELESTARIAN SUMBER SEJARAH ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**ZAITUN MUNAR
NIM. 511202712**

Mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora
Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**EKSISTENSI PUSAT DOKUMENTASI DAN INFORMASI ACEH
TERHADAP PELESTARIAN SUMBER SEJARAH ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu
Beban Studi Prodi Sarjana (S1)

Oleh:

**ZAITUN MUNAR
NIM. 511202712**

Disetujui Untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Drs. Nasruddin AS. M. Hum.
Nip: 19621215 199303 1 002

Pembimbing II

Ruhamah, M.Ag.
Nip: 19741224 200604 2 002

A R - R A N I R Y

Mengetahui

Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Dr. Fauzi Ismail M.Si
Nip: 19680511 199402 1 001

**Telah Dinilai oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus dan Disahkan Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Tugas Sarjana S-1
Dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam**

Pada Hari / Tanggal
Rabu, 1 Agustus 2018

di

Darussalam, Banda Aceh

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

Drs. Nasruddin AS, M.Hum
NIP. 196212151993031002

Sekretaris,

Ruhamah, M.Ag
NIP. 197412242006042002

Penguji I,

Sanusi, M.Hum
NIP. 197004161997031005

Penguji II,

Drs. Nurdin, M.Hum
NIP. 195808251989031005

AR - RANIRY

Mengetahui

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Dr. Fauzi, M.Si
NIP. 196805111994021001

SURAT PENGAKUAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zaitun Munar
NIM : 511202712
Jurusan : Sejarah Kebudayaan Islam
Judul Skripsi : Eksistensi Pusat Dokumentasi Dan Informasi Aceh
Terhadap Pelestarian Sumber Sejarah Aceh

Mengakui dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah ASLI karya saya sendiri, dan jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan ini, saya bersedia diberikan sanksi akademik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Banda Aceh, 20 Januari 2018

Penulis,



Zaitun Munar

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji serta syukur atas kehadiran ALLAH SWT. yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan ridha-Nya. Shalawat beriring salam tidak lupa peneliti sanjungkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini berupa Skripsi yang berjudul “Eksistensi Pusat Dokumentasi Dan Informasi Aceh Terhadap Pelestarian Sumber Sejarah Aceh” Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus peneliti selesaikan guna untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Peneliti menyadari bahwa selama proses penelitian sampai penyusunan laporan penelitian ini selesai, peneliti banyak mendapat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih atas segala bantuan, saran, dan kritikan yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini. Ucapan terimakasih selanjutnya peneliti sampaikan kepada pembimbing I Bapak Drs. Nasruddin AS, M.Hum dan Ibu Ruhamah, M.Ag selaku pembimbing II. Kemudian kepada Bapak Dr. Fauzi M.Si. selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna. Penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi tercapai hasil yang lebih baik. Akhir kata, kepada Allah peneliti mohon ampun semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi segenap pembaca. *Amin Ya Rabbal'alamin.*

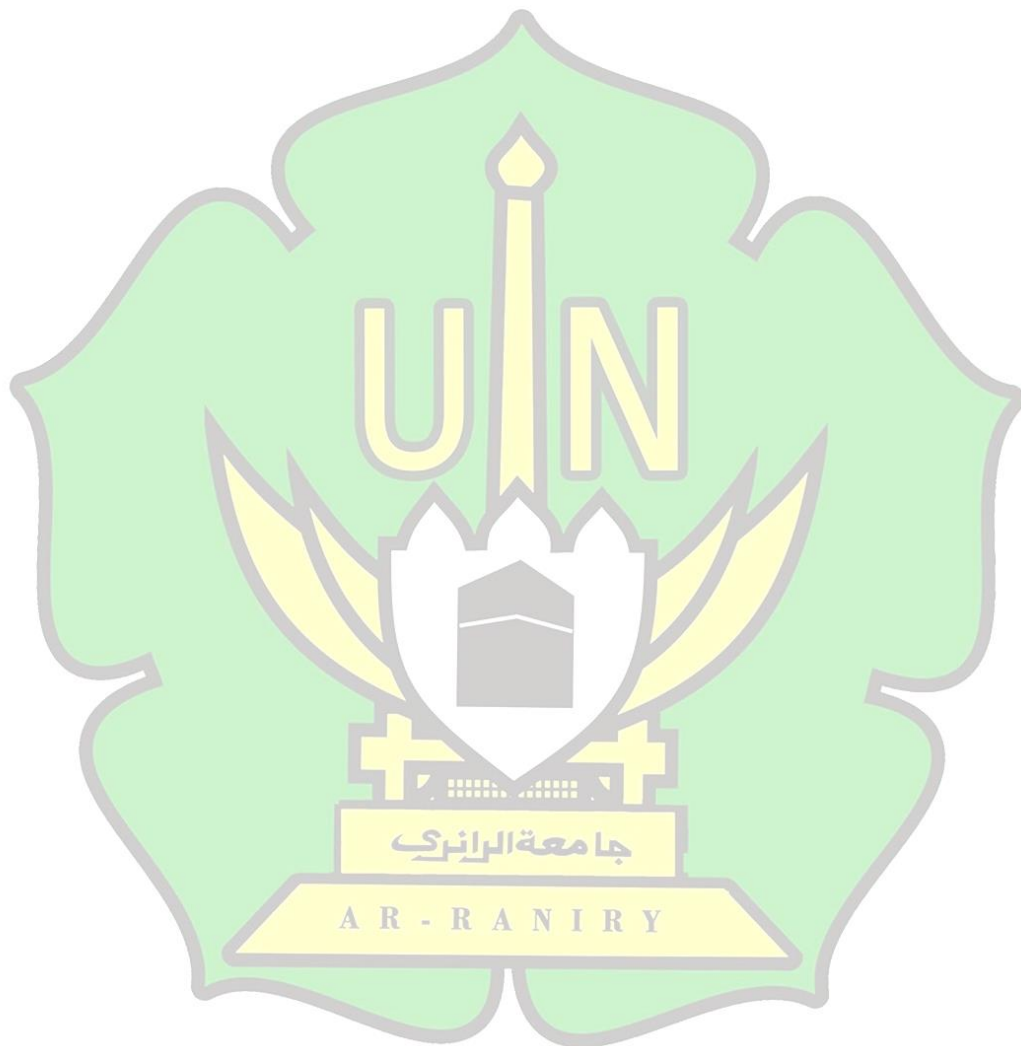
Banda Aceh, 23 Juli 2018
Penulis,

Zaitun Munar

DAFTAR ISI

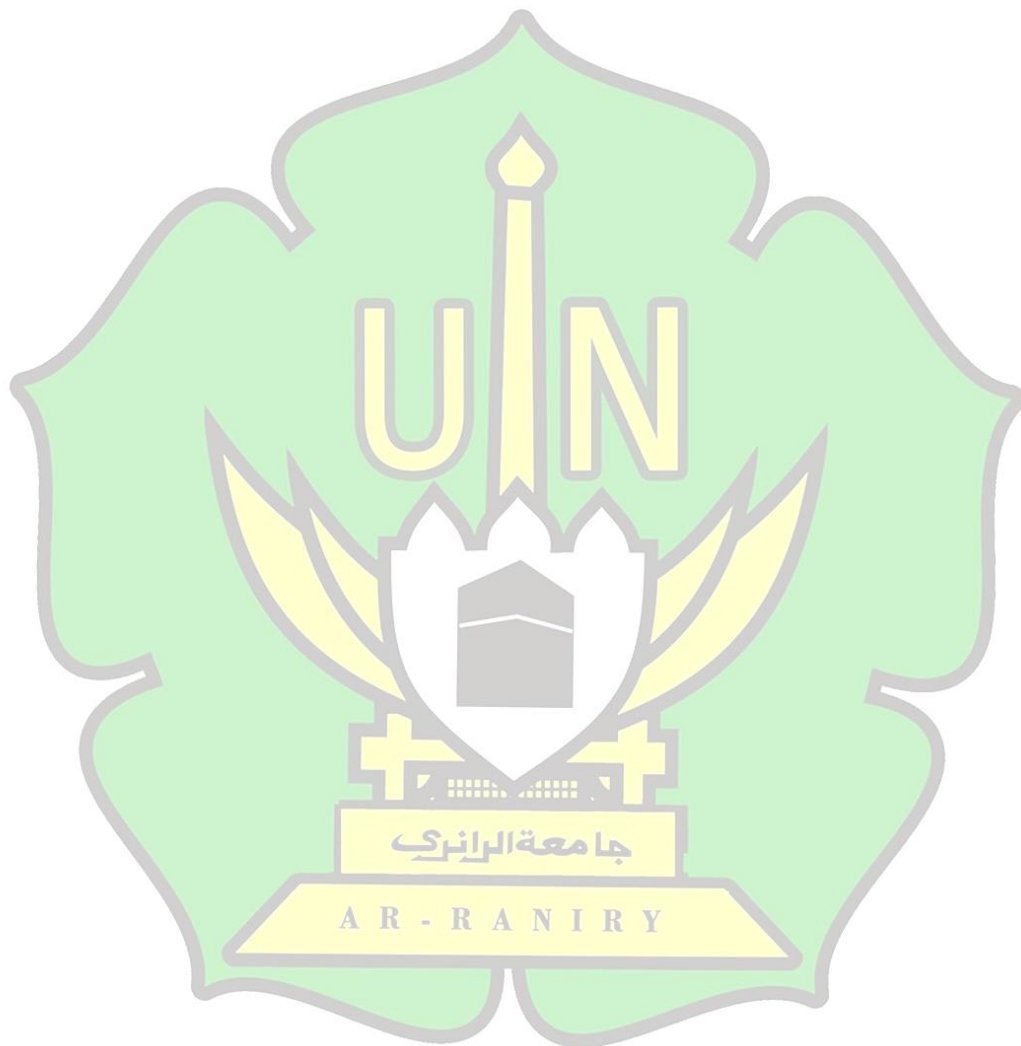
LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	
SURAT PENGAKUAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	6
F. Kajian Pustaka	7
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II SEJARAH PEMBENTUKAN PUSAT DOKUMENTASI INFORMASI ACEH.....	13
A. Gambaran Umum PDIA.....	13
B. Ide Awal Pembentukan PDIA.....	14
C. Tujuan Pendirian PDIA.....	21
D. Kondisi PDIA Dari Tahun Ke Tahun	23
BAB III EKSISTENSI PUSAT DOKUMENTASI INFOMASI ACEH TERHADAP PELESTARIAN SUMBER SEJARAH ACEH	29
A. Pelestarian Dokumen-Dokumen Bersejarah	29
B. Langkah – Langkah Pelestarian Dokumen Bersejarah	35
C. Pemberdayaan Bokumen Untuk Kebutuhan Publik	36
D. Eksistensi Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.....	37
E. Respon Masyarakat Terhadap Pusat Dokumentasi Infomasi Aceh.....	44
F. Respon Pemerintah Terhadap Pusat Dokumentasi Informasi Aceh.....	47

BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.....	42
Tabel 4.2 Jumlah Koleksi PDIA dari Tahun 1978-2014.....	45
Tabel 4.3 Data Pengunjung PDIA dari Tahun 1977-2014.....	49
Tabel 4.4 Nama Direktur Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.....	53



ABSTRAK

Provinsi Aceh memiliki banyak peninggalan sejarah dan penyumbang khazanah manuskrip terbesar dalam dunia pernaknakan, memiliki sejarah yang demikian panjang dan menyisakan banyak tinggalan-tinggalan baik dari arkeologis, karya-karya sejarah (naskah dan manuskrip). Disamping kesadaran sejarah yang semakin menebal maka sumber-sumber informasi yang sudah terkumpul disediakan tempat khusus untuk disimpan pada lembaga-lembaga atau institusi resmi milik pemerintah maupun swasta untuk menjaga keamanan dan ke-otentikan dokumen bersejarah, dan PDIA merupakan salah satu lembaga/institusi tempat penyimpanan dokumen-dokumen bersejarah yang ada di wilayah Aceh. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa dengan kritis Eksistensi Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh dalam pelestarian sumber sejarah Aceh dan Respon pemerintah Aceh dan masyarakat dalam upaya pelestarian sumber sejarah Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* dan *field research*, instrument yang digunakan yaitu studi pustaka (studi dokumentasi), wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) proses pelestarian dokumen-dokumen bersejarah melalui berbagai tahapan dan karena bersifat mudah rusak maka perlu diperhatikan beberapa hal seperti jenis bahan, penyebab kerusakan, dan tahapan perawatan secara tepat guna upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional. (2) perkembangan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh tiap periodenya selalu berubah disebabkan beberapa kondisi dari internal maupun eksternal dan memiliki sejarah panjang sejak berdiri hingga saat ini. (3) Tanggapan (respon) masyarakat atau pengunjung lebih kepada ketersediaan sumber referensi yang terdapat di PDIA, sedangkan pemerintah lebih kepada pembangunan sarana dan prasarana.

Kata kunci: *Eksistensi, dokumentasi, pelestarian*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah sumber sejarah yang disebut juga dengan jejak masa lampau karena merupakan sumber informasi untuk penelitian sejarah. Jejak masa lampau dapat dikelompokkan dalam dua bagian kelompok pertama yaitu sumber non material yakni sumber yang tidak berwujud, tidak dapat dilihat dan diraba, hanya bisa diketahui karena terdapat dan berlaku dalam kehidupan masyarakat, dan sumber material.

Sumber material ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Adapun yang dimaksud sumber tertulis, yaitu apa saja warisan masa lampau yang ditinggalkan manusia dalam bentuk tulisan, dokumen yang dapat memberikan keterangan atau informasi tentang masa lampau itu sendiri. Dalam pencarian sumber sejarah, dokumen merupakan salah satu sumber primer. Silalahi mengungkapkan bahwa, “sumber primer adalah suatu objek ataupun dokumen asli yang berupa material mentah dari pelaku utamanya yang disebut sebagai *first-hand information*. Dokumen merupakan salah satu aspek penting dalam penelitian sejarah.

Sebagaimana diketahui Provinsi Aceh memiliki banyak peninggalan sejarah dan penyumbang khazanah manuskrip terbesar dalam dunia pernaknahan di Archipelago Nusantara atau Asia Tenggara purbakala dan memiliki sejarah yang demikian panjang menyisakan banyak tinggalan-tinggalan baik dari

arkeologis, karya-karya sejarah (naskah dan manuskrip) dan hingga saat ini masih diupayakan pelestariannya. Dari karya-karya sejarah (sumber sejarah) kita dapat mengetahui bahwa diwilayah yang sekarang dikenal dengan nama Propinsi Aceh pernah ada kerajaan yang bercorak Islam seperti Pasai, Perlak, Pedir, Daya, dan telah mewariskan jejak-jejak atau sumber-sumber sejarah yang sangat berguna untuk merekonstruksi hal-hal yang berhubungan dengan sejarah Islam di Aceh, dan sumber-sumber Aceh Darussalam.

Sejarah kerajaan-kerajaan tersebut ada yang tertulis dan tidak tertulis. Diantara sumber tertulis yang paling penting adalah yang sekarang disebut naskah kuno yang merupakan khazanah hasil budaya masyarakat Aceh tempo dulu yang Islami. Naskah ini berupa tulisan tangan yang ditulis di atas kertas. Ia adalah karya para intelektual Islam, baik ulama, ilmuwan, maupun pujangga. Jumlahnya relatif/tidak terhitung sehingga tidak berlebih-lebihan bila salah seorang pakar ilmu sosial asal Perancis Henry Chambert Loir yang pernah meneliti naskah di Aceh mengatakan bahwa Aceh adalah gudang naskah di Nusantara. Naskah ini sampai sekarang masih tersebar di tengah masyarakat Aceh.

Di samping itu karena kesadaran sejarah semakin menebal maka sumber-sumber informasi yang sudah terkumpul disediakan tempat khusus untuk disimpan pada lembaga-lembaga atau institusi resmi milik pemerintah dan swasta untuk menjaga keamanan dan ke-ontentikan dokumen-dokumen bersejarah

tersebut,¹ seperti di Museum Aceh, Perpustakaan dan Museum Ali Hasjmy dan Perpustakaan Tanoh Abee termasuk Pusat dokumentasi dan informasi aceh selanjutnya disebut PDIA Banda Aceh. Di Aceh sendiri terdapat lembaga/institusi tempat penyimpanan dokumen-dokumen bersejarah yaitu PDIA.

PDIA adalah pusat koleksi buku-buku dan manuskrip langka tentang Aceh. PDIA adalah badan yang bersifat mandiri sebagai salah satu perwujudan kerjasama antara pemerintah Daerah Istimewa Aceh dengan Universitas Syiah Kuala, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh mendapat bimbingan administratif dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh serta bimbingan teknis ilmiah dari rektor Universitas Syiah Kuala dan kedua pejabat tersebut merupakan unsur pimpinan tertinggi Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. Lembaga yang didirikan pada tanggal 26 Maret 1977 ini awalnya bernama Pusat Dokumentasi Aceh, ide pertama untuk mendirikan sebuah "*Institute of Achenese Studies*" digagas oleh Drs. Teuku Ibrahim Alfian, M.A dalam seminar Pekan Kebudayaan Aceh kedua tahun 1972. Lembaga ini merupakan lembaga mandiri hasil perwujudan kerjasama antara pemerintah Aceh dengan Universitas Syiah Kuala yang diharapkan menjadi pusat kajian Aceh (*Achenese studies*), berfungsi sebagai sumber data primer berbentuk buku dan gambar (foto) seperti yang digagas oleh perintisnya Teuku Ibrahim Alfian. Secara singkatnya PDIA berfungsi sebagai salah satu wadah untuk menyimpan, penyedia sumber-sumber

¹ M. Adril Septian, Skipsi, *Perkembangan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh*, Banda Aceh, Unsyiah (2014), hal. 1

sejarah Aceh di samping memajukan studi tentang Aceh terutama studi tentang sejarah Aceh.²

Saat ini koleksi PDIA masing-masing manuskrip sebanyak 993 naskah, *e-book* sebanyak 657 judul, buku 1.610 judul (3.117 eksemplar), buku langka 781 judul (cetak dan digital), foto sebanyak 1.275, peta sebanyak 352, dan dokumen sebanyak 8.080 (termasuk kepemilikan tanah bekas tsunami). Hampir 70% dari buku-buku itu mengenai sejarah, kebudayaan, kesusastraan Aceh dan agama Islam yang sebagian besar dalam bahasa Belanda dan Inggris. Keberadaan PDIA sejak awal berdiri hingga saat ini terus mengalami berbagai kondisi, dan kondisi yang paling pesat terjadi pasca Gempa Tsunami 26 Desember 2004 di Aceh yang meluluh lantakkan seluruh gedung PDIA beserta isinya sehingga Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengadakan suatu penelitian sejarah lewat pelestarian sumber sejarah Aceh dan mengambil penelitian dengan judul **"Eksistensi Pusat Dokumentasi Dan Informasi Aceh terhadap Pelestarian Sumber Sejarah Aceh"**

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Eksistensi PDIA dalam pelestarian sumber sejarah Aceh (dokumen sejarah)?
2. Bagaimana respon Masyarakat dan Pemerintah Aceh terhadap Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh dalam upaya pelestarian sumber sejarah Aceh?

² Artikel Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Testimoni Saksi Sejarah Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh: *Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh Mencari Masa Depan*, Banda Aceh, 2015

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui eksistensi PDIA dalam Pelestarian sumber Sejarah Aceh
2. Untuk mengetahui respon Masyarakat dan pemerintah Aceh terhadap PDIA dalam upaya pelestarian sumber sejarah Aceh

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang penulis kemukakan, adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat akademis: penelitian ini dapat menjadi telaah atau pun bahan kajian dikampus maupun menjadi sebuah kajian khazanah keilmuan yang dibutuhkan oleh kalangan akademis dan intelektual. Hasil penelitian ini sendiri diharapkan semoga menjadi suatu kajian yang melahirkan karya ilmiah yang baik dan menarik dan penulis berharap semoga penelitian tentang ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan.

Manfaat praktis: penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi semua kalangan, dan juga memberikan kontribusi kepada ilmu serta sebagai masukan dalam penelitian dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa sehingga dengan adanya penelitian ini dapat mempermudah penelitian selanjutnya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memahami karya ilmiah ini, penulis menjelaskan beberapa penjelasan istilah penting yang terdapat dalam penelitian ini, di antaranya:

- Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada.³
Adapun Eksistensi yang penulis maksudkan di sini ialah keberadaan Pusat Dokumentasi Informasi Aceh yang terbentuk pada tahun 1977 dan peranannya dalam pelestarian sumber sejarah Aceh dari awal pembentukan sampai saat ini.
- PDIA adalah sebuah lembaga mandiri yang menjadi perwujudan kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Universitas Syiah Kuala yang bertujuan untuk memperdalam studi tentang Aceh.⁴
- Pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang mendukung, baik dari dalam maupun luar hal yang dilestarikan.⁵ Oleh karena itu perlu pelestarian di PDIA ini yaitu supaya bahan-bahan pusaka yang tersimpan di dalam PDIA bisa terjaga dan bisa memperpanjang umur bahan-bahan yang memiliki arti dan nilai bersejarah.
- Sumber sejarah adalah semua yang menjadi pokok sejarah segala sesuatu yang berujud dan tidak berujud serta berguna bagi penelitian sejarah zaman purba

³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Cet 2-3 Jakarta : Balai Pustaka, 2002, hal. 288

⁴Artikel Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, *Testimoni Saksi Sejarah Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh Mencari Masa Depan*, Banda Aceh 2015

⁵Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Difa Publisher, 2008, hal. 531

sampai sekarang dan kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka, peneliti telah menemukan beberapa literatur tentang hal-hal yang memiliki hubungan erat dengan topik ini yang menjadikan penelitian ini bukan satu-satunya yang menaruh perhatian PDIA terhadap sumber sejarah Aceh. Ada beberapa buku dan penelitian lainnya yang menulis tentang PDIA yang menjelaskan tentang ini dan beberapa beberapa buku lainnya, junal, sinopsis dan penelitian berisi penjelasan secara umum tentang eksistensi Pusat Dokumentasi Informasi Aceh. Ada beberapa tulisan yang menyangkut dengan permasalahan tersebut, di antaranya adalah:

Rusdi Sufi dalam buku yang berjudul "*Sekilas Perjalanan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh*", menjelaskan bahwa pencetus gagasan pendirian PDIA adalah Drs. Teuku Ibrahim Alfian, M.A. Pada tanggal 2 september 1974 dalam rangka memperingati ulang tahun Universitas Syiah Kuala ke XIII, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh menyerahkan tanah dan gedung bekas kediaman pejabat pada masa Pemeritahan Belanda kepada Universitas Syiah Kuala. PDIA kemudian diresmikan pada tanggal 26 Maret 1977 atau tepat 104 tahun perang Belanda di Aceh.⁶

H.M. Thamrin Z dan Edy Mulyana dalam buku yang berjudul "*Perpustakaan di Aceh Sepanjang Masa*" menyebutkan bahwa, PDIA pernah

⁶M. Adril Septian, *Perkembangan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh*, Banda Aceh, Unsyiah (2014), Hal. 17

bekerja sama dengan Perpustakaan Wilayah Aceh. PDIA meminjamkan bangunan sayap kirinya untuk di tempati selama hampir 7 tahun lamanya. Beberapa kepala PDIA yang bersama-sama ikut mengembangkan dunia arsip, dokumentasi, dan perpustakaan di Aceh adalah: Ibrahim Alfian, Adnan Hanafiah, Wamad Abdullah, Abubakar, dan Rusdi Sufi. Pada prinsipnya kepala PDIA harus orang Unsyiah kecuali bila ada kebijakan lain dari gubernur. PDIA didirikan pada 26 Maret 1977 oleh Pemda Provinsi Aceh bekerjasama dengan Universitas Syiah Kuala.

Koleksi PDIA semula berjumlah lima ribu judul mengenai sejarah, politik, kebudayaan, dan lain-lain. Sekitar 50 judul di antaranya merupakan terjemahan bagian-bagian penting tentang Aceh dari tulisan karya orang Belanda. Juga terkumpul sebanyak 147 manuskrip dalam bahasa Aceh. Namun semua koleksi ini hancur dan rusak karena tsunami, sebagian dapat dipulihkan dengan teknik khusus meskipun tidak dapat kembali seperti semula.⁷

Dalam jurnal *Diseminasi Koleksi Buku Langka Elektronik Tentang Aceh Secara Online Pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA)* dijelaskan tentang bagaimana fungsi Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh sebagai sebuah institusi yang menyediakan jasa dalam hal informasi dan dokumentasi dari berbagai hal tentang Aceh, dengan keterbatasannya dalam hal penyediaan informasi, dimana informasi yang disediakan masih secara konvensional, sehingga diperlukan perubahan pelayanan untuk lebih memudahkan masyarakat

⁷Thamrin & Mulyana, Edy. *Perpustakaan di Aceh Sepanjang Masa*. Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh (2011),

memanfaatkan karya dan bahan bahan yang disediakan oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.

Selanjutnya buku yang berjudul “PKA II Pencerminan Aceh Yang Kaya Budaya” buku ini sebenarnya merupakan buku yang sudah sangat tua diterbitkan pada tahun 1972, namun penulis tetap memakainya dikarenakan buku ini menceritakan bagaimana terbentuknya dan lahirnya ide dibuatnya Pusat Dokumentasi Informasi Aceh yang pertama sekali.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library reseach* yaitu dengan mengkaji dokumen-dokumen PDIA dengan membaca buku-buku seperti, artikel, skripsi, dan jurnal. Dan penelitian lapangan (*field reseach*) adalah suatu jenis penelitian yang lebih mengutamakan data primer di lapangan, karena untuk mencari, mengumpulkan dan memperoleh data-data primer yang terjadi di lapangan penelitian. Dalam hal ini penulis mengkaji dokumen-dokumen PDIA. Adapun data-data yang terkait dengan PDIA ini diperoleh melalui:

a. Studi Pustaka/Studi Dokumentasi

Studi pustaka atau studi dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data yang lebih jelas, penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian tersebut dengan cara membaca buku-buku Ensiklopedi, majalah, jurnal dan tulisan lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumentasi juga dapat berupa foto yang berkaitan dengan penelitian ini untuk melengkapi data yang sudah didapatkan melalui wawancara

b. Wawancara

Pengumpulan data juga akan dilakukan penulis dengan cara wawancara secara terbuka terhadap para staf di kantor PDIA dan narasumber lain. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi tentang rumusan masalah yang sudah disusun. Agar hasil wawancara terekam baik, penulis menggunakan alat wawancara seperti buku catatan dan alat perekam, serta menyiapkan instrumen wawancara tentang masalah yang akan diteliti. Wawancara (*interview*). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur. Kegiatan wawancara terstruktur peneliti lakukan dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara.

Peneliti menentukan pertanyaan berdasarkan permasalahan yang akan diajukan dalam pertanyaan penelitian serta mengajukan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti sendiri. Pada awalnya wawancara dilakukan dengan menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur kepada informan, kemudian satu persatu diperdalam kembali untuk memperoleh keterangan lebih lanjut. Dalam proses melakukan wawancara adakalanya pembicaraan sedikit melenceng dari inti pokok permasalahan akan tetapi peneliti mengarahkan kembali pembicaraan sesuai dengan topik. Dalam penelitian yang menjadi informan. Adapun narasumber yang akan diwawancarai antara lain:

- (1) Direktur Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Drs. Mawardi M. Hum
- (2) Mantan Direktur Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Drs. Rusdi Sufi
- (3) Mantan kepala Museum Aceh , Drs. Nurdin AR, M. Hum

- (4) Dosen ilmu perpustakaan, Zikrayanti M. LIS
- (5) Jajaran karyawan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh,
- (6) Staf Perpustakaan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
- (7) Pengunjung Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh,
- (8) Pihak-pihak lain yang direkomendasikan oleh narasumber sebelumnya

c. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati objek yang akan diteliti. Penulis akan melihat secara langsung kegiatan yang ada di kantor PDIA. Melalui observasi penulis dapat mengenal lebih dekat para karyawan di kantor PDIA. Data yang berhasil penulis dapatkan pada saat melakukan observasi adalah gambaran PDIA secara umum, seperti lokasi, kondisi gedung, para karyawan, jam kerja, dan kondisi perpustakaan yang terdapat di PDIA.

d. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah semua data primer dan sekunder terkumpul, yang kemudian diolah kembali oleh penulis. Analisis berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dengan tema-tema yang sama. proses awalnya adalah mengolah data dengan cara mengkategorikan atau mengelompokkan setiap data yang terkumpul.

Dalam hal verifikasi akan dilakukan pekerjaan melihat kelengkapan data yang telah didapatkan. Hal ini dimaksudkan untuk dilakukan penulisan kejelasan tulisan kejelasan makna yang didapatkan dari jawaban, kesesuaian pertanyaan satu dengan pertanyaan lainnya, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data

I. Sistematika Pembahasan penelitian

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini maka penulis membagi ke dalam empat bab pembahasan penelitian. Masing-masing bab mempunyai sub bab tersendiri dan antar satu bab dengan bab lain yang saling berkaitan.

Bab I merupakan pendahuluan dalam penelitian ini didalamnya terdapat delapan sub-bab yang akan diuraikan yaitu: mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka , metode penelitian, dan bagian terakhir dari bab ini adalah sistematika pembahasan untuk mengetahui sekilas isi pembahasan dari tiap-tiap bab dalam skripsi ini.

Bab II penulis menjelaskan poin penting, yaitu Gambaran PDIA, ide awal pembentukan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, tujuan pendirian PDIA, dan Kendala PDIA.

Bab III merupakan bagian inti dari hasil penelitian tentang Eksistensi PDIA terhadap Pelestarian Sumber Sejarah Aceh. Didalam bab ini penulis menguraikan tentang Pelestarian dokumen-dokumen Sejarah, pemberdayaan dokumen kebutuhan publik respon masyarakat terhadap PDIA dan Respon pemerintah terhadap PDIA. Selanjutnya di bab terakhir yaitu bab IV, merupakan bab penutup. menguraikan tentang kesimpulan hasil analisis dari keseluruhan pembahasan dan saran-saran untuk penelitidimasa yang akan datang.

BAB II

SEJARAH PEMBENTUKAN PUSAT DOKUMENTASI DAN INFORMASI ACEH

A. Gambaran Umum Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh

Pada awalnya PDIA berlokasi di Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim, namun dalam perkembangan selanjutnya lokasi Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh dipindahkan ke kompleks Museum Aceh di Jalan Sultan Alaidin Mahmud Syah, sedangkan gedung awalnya kini dialihkan menjadi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unsyiah. Menurut Dra Zunaimar mantan Direktur PDIA, sempat terjadi ketegangan antara pihak PDIA dengan Unsyiah pada saat pengalihan fungsi gedung tersebut sebagai Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unsyiah. Sejak awal, berdasarkan pidato Rektor Unsyiah pada upacara peresmian gedung PDIA tanggal 26 Maret 1977, telah terjadi kemelut antara berbagai pihak mengenai status gedung awal Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh tersebut. Ada pihak yang menghendaki agar tanah dan bangunan yang ada dijadikan rumah dinas, tempat pemukiman pribadi, atau guest house, sedang dilain pihak menghendaki agar di rumah tua yang bersemi nilai-nilai sejarah itu dimanfaatkan kepentingan umum secara lebih luas.

Pada akhirnya, tanah dan bangunan tersebut diwakafkan kepada Universitas Syiah Kuala melalui Sekwilda Muhammad Hasan Basri, S.H. disaksikan oleh Menteri P dan K, Syarif Thajeb pada tanggal 2 September 1974

untuk dijadikan PDIA. Seperti telah dijelaskan, sejak awal pendirian PDIA telah mendapatkan banyak tanggapan dari berbagai pihak, puncaknya adalah saat terjadinya pengalihan gedung PDIA menjadi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unsyiah, sehingga akhirnya lokasi PDIA dipindahkan ke kompleks Museum Aceh jalan Sultan Alaidin Mahmud Syah, tepatnya di salah satu ruangan (11x11m) di lantai dua sebelah kanan rumah Aceh.

B. Ide Awal Pembentukan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh

Gagasan pendirian PDIA untuk pertama kali dicetuskan dalam seminar Pekan Kebudayaan Aceh Kedua tahun 1972 oleh Drs. Teuku Ibrahim Alfian, M.A yang merupakan lektor Kepala Fakultas Sastra dan Kebudayaan Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Ketika itu beliau bertugas pada Universitas Kebangsaan Malaya di Kuala Lumpur.⁸

Gagasan tersebut dimaksud supaya di Banda Aceh dibangun sebuah “*Institute of Achenese Studies*” sejenis “Atjeh institut” yang pernah didirikan pada masa penduduk Belanda di Aceh, tepatnya 1 Agustus 1914 di Amsterdam.

Dalam sejarah kelahirannya, tidak terlepas dari situasi negara yang dialami oleh bangsa secara keseluruhan. Waktu Repelita dimulai tahun 1969, kekacauan ekonomi akibat G/30/S luar biasa, pada tahun 1966 Indonesia mengalami inflasi, terjadi masalah sosial cukup rumit yang dihadapi negara Indonesia. Amerika

⁸Statuta Pusat Dokumentasi Dan Informasi, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh Banda Aceh 1978

Serikat yang dibantu *Ford Foundation* mengkaji apa penyebab inflasi yang begitu tinggi di Indonesia. *Ford Foundation* menyimpulkan akan membantu Indonesia untuk memperbaiki masalah sosial. Disimpulkan akan ada bantuan terhadap Universitas untuk meningkatkan kualitas. Timbul gagasan dari *foundation* untuk mendirikan lembaga-lembaga ilmiah untuk anak-anak muda yang dipilih, maka lahirlah Lembaga Pusat Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (LPPIS) didirikan tahun 1974 di Universitas Banda Aceh.

Berita *Ford Foundation* didengar Pak Muzakir Walad yang pada masa itu menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Aceh, beliau ke Leknas (Lembaga Ekonomi Nasional) untuk menyiapkan pendirian lembaga tersebut yang di tempatkan di Darussalam. Syaratnya Pemda dan Universitas menyiapkan keperluan-keperluan yang diminta *Ford Foundation*, dan Pak Muzakir bersedia menyetujuinya.

Maka didirikanlah lembaga itu sewaktu Ibrahim Hasan menjabat Rektor Universitas Syiah Kuala yang dipimpin oleh doktor bidang Ilmu Sosial. Langkah yang ditempuh untuk membantu Indonesia secara umum melalui latihan tenaga tenaga muda, yang diberikan waktu setahun dan tiap tahun dilatih 12 orang yang dikirim ke Aceh. Tujuan dari pusat latihan ini adalah membentuk lembaga Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh sebagai lembaga yang sangat khas, lalu dibuat satu statuta yang mencantumkan ayat deskripsi dalam bentuk surat keputusan bersama antara Gubernur Aceh dengan Universitas Syiah Kuala. Sesuatu yang tidak bisa diabaikan karena mengingat tidak ada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Aceh yang memberikan wewenang statuta.

Gagasan itu baru menjelma pada tahun 1974 dengan didirikan Pusat Latihan Penelitian Ilmu Sosial di Darussalam-Banda Aceh yang direktornya adalah Dr. Alfian (1974–1976), seorang ahli ilmu politik LEKNAS_LIPI. Dr. Ibrahim Hasan (Rektor Universitas Syiah Kuala) beliaulah yang telah berusaha keras untuk pembentukan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh dengan memperoleh bantuan sepenuhnya dari Pemerintah Daerah Istimewa Aceh. Pada tahun yang sama (1974) lahir pula sebuah proyek yang dinamakan KA 013 dalam rangka *Kulturel Akkood* (Kerjasama Kebudayaan) Belanda–Indonesia yang turut membantu menyediakan buku-buku sebagai persiapan untuk didirikannya Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.⁹

Drs. F.G.P. Jaquet, kepala kearsipan pada *Koninklijk Instituut voo Taal-, Land-en Volkenkunde* (KITLV) di Leiden telah memberikan bantuan yang sangat berharga dalam hal menyeleksi bahan-bahan informasi yang berkaitan dengan Aceh di negeri Belanda dan sekaligus mengupayakan pengirimannya ke Banda Aceh.

Dalam rangka persiapan kelahiran Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh dan berkat kebijakannya Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, sebuah bangunan yang pada masa pemerintah Belanda yang dijadikan sebagai tempat kediaman *Asistent Resident Terbeschikking* dan pada masa pemerintahan Republik Indonesia dihuni oleh pejabat *Resident Atjeh* dijadikan calon gedung Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, dan pada tanggal 2 September 1974 dalam rangka memperingati ulang tahun Universitas Syiah Kuala ke XIII, Gubernur

⁹*Ibid.*

Kepala Daerah Istimewa Aceh menyerahkan tanah dan gedung tersebut kepada Universitas Syiah Kuala dengan disaksikan oleh Menteri Pendidikan dan kebudayaan Dr. Syarif Thayeb dan panglima Kodam I/Iskandar Muda Brigadir Jenderal A. Rivai Harahap. Selama 2 tahun departemen P dan K Republik Indonesia menyediakan sejumlah dana untuk pemugaran gedung dan penambahan beberapa bangunan baru. Pemerintah Daerah selain menyerahkan gedung dan tanah juga telah membantu sejumlah biaya selama 2 tahun untuk pengadaan alat-alat perlengkapan dan sebagainya.

Akhirnya pada tanggal 26 maret 1977, tepatnya 104 tahun pernyataan perang kerajaan Belanda kepada Kerajaan Aceh, diresmikanlah pendirian Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. Peresmian itu dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Dr. Syarif Thayeb, para pejabat setempat dan para tokoh di Aceh seperti Prof. A. Madjid Ibrahim, Drs. Teuku Ibrahim Alfian, M.A Dr. Alfian, M. Hasan Basri SH dan lain-lain mereka yang telah berjasa besar dalam pendirian dan perkembangan PDIA. Selain dari tamu dalam negeri pada acara peresmian tersebut hadir pula para tamu dari negeri Belanda yaitu Pof. A. Teeuw, Ketua Proyek Kerjasama Belanda Indonesia. Dr. A. J. Piekaar, mantan Sekretaris Keresidenan Aceh pada masa Pemerintah Belanda (193-197) serta Mr. A. Vleer, mantan *adspirant Contoleurl* di Lhoksukon (1932-1934), dan terakhir pensiunan Walikota Enshede Negeri Belanda.

Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh diresmikan pemakaiannya untuk umum pada tanggal 3 September 1977 dalam rangka memperingati hari jadi Universitas Syiah Kuala yang ke XVI. Semula bernama PDIA, tetapi kemudian

diubah menjadi PDIA. Gedung yang dihibahkan kepada Universitas Syiah Kuala oleh pemerintah Daerah Istimewa Aceh untuk Perpustakaan, oleh Universitas Syiah Kuala kemudian dijadikan sebagai gedung PDIA. Lima tahun kemudian Drs. Teuku Ibrahim Alfian pencetus gagasan PDIA menjadi Direktur pertama PDIA. Secara garis besar susunan organisasi PDIA telah diatur pada pasal 7 ayat 2 Anggaran Dasar yang meliputi :

- a. Dewan Kehormatan
- b. Dewan Pengarah
- c. Direktur
- d. Sekretariat sebagai unsur pelayan
- e. Bidang-bidang sebagai unsur pelaksana

Pasal 9 Statuta PDIA menyebutkan, Dewan Pengarah terdiri dari :

- a. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh selaku Ketua, Merangkap Anggota;
- b. Rektor Universita Syiah Kuala selaku Wakil Ketua, merangkap Anggota;
- c. Ketua Dewan [Perwakilan Rakyat selaku anggota
- d. Ketua Majelis Ulama selaku anggota
- e. Sekretaris Wilayah/Daerah selaku anggota
- f. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selaku anggota;
- g. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku anggota
- h. Staf Sekretariat wilayah Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Anggota;

i. Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah selaku anggota¹⁰

Setelah PDIA berkiprah dari tahun 1977-2004 telah banyak membantu peneliti-peneliti tentang sejarah informasi tentang Aceh. Namun terjadinya Gempa Bumi dan Tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 tidak terkecuali juga meluluh lantakkan seluruh gedung PDIA beserta isinya, sehingga sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, PDIA mengalami kendala dalam hal pelayanan kepada masyarakat, karena belum tersedianya gedung yang representatif seperti layaknya sebuah pusat informasi. Meski sejumlah koleksi mulai terkumpul kembali melalui bantuan hibah Badan Rehabilitas dan Rekonstruksi (BRR NAD-Nias) dengan menggandakan judul-judul buku tentang Aceh yang terdapat pada sejumlah perpustakaan yang ada di Banda Aceh, juga dari *Stichting Peutjut Fonds* berupa foto-foto dan buku-buku langka tentang Aceh serta 35 peta masa kolonial Belanda yang masih disimpan oleh Drs. Rusdi Sufi, direktur PDIA periode 29 September 2006 sampai 2 Februari 2013.¹¹

Akhinya pada tahun 2008 sebuah gedung yang dibangun oleh BRR NAD-Nias yang dilengkapi dengan fasilitas khusus (dibelakang gedung utama dibangun 6 unit ruangan/kamar beserta perabotnya) diperuntukkan bagi peneliti tentang Aceh, gedung yang telah selesai dibangun oleh BRR NAD-Nias untuk PDIA. Sementara KITLV perwakilan Jakarta menyumbang E-Book tentang Aceh dalam sebuah database berjumlah 656 judul. Bantuan selanjutnya adalah dari Dr.

¹⁰Statuta Pusat Dokumentasi Dan Informasi, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh Banda Aceh, 1978

¹¹Wawancara dengan Drs. Rusdi Sufi, Pimpinan Kherkhof, mantan pimpinan PDIA, 02 November 2016

Fakhriati (filolog asal Aceh) yang berdinasi di Kementerian Agama RI Jakarta, mewakafkan 483 judul manuskrip/naskah klasik dalam bentuk digital.

Tiga tahun kemudian tepatnya tahun 2011, gedung PDIA dimanfaatkan untuk sementara secara bersama yaitu dengan program Studi Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Bagian depan gedung digunakan oleh PDIA (834 M). Sementara bagian belakang (1096 M) termasuk lantai dua digunakan oleh Program Studi Kedokteran Gigi Unsyiah untuk ruang kuliah dan praktek kepaniteraan mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Unsyiah. Hal ini berlangsung lebih kurang tiga tahun (2011-2013), selanjutnya pada pertengahan Juni 2014, dan seterusnya berdasarkan surat Gubernur Aceh Nomor. 90/1343 tanggal 2 April 2014, gedung PDIA fungsikan untuk menjadi Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Unsyiah, sementara PDIA dipindahkan oleh Gubernur ke komplek Museum Aceh, jalan Sultan Alaidin Mahmud Syah, tepatnya di salah satu ruangan (11x11m) di lantai dua sebelah kanan rumah Aceh. Gedung yang di gunakan untuk PDIA dikompleks Museum Aceh sekarang yang dulunya merupakan gedung Audio visual Museum, yaitu ruang audio yang digunakan oleh pengunjung Museum untuk mendengar penjelasan tentang Museum dengan diputar informasi keberadaan PDIA di ruang audio visual Museum Aceh tentang keberadaan pentingnya berkunjung ke Museum sebelum kemudian pengunjung memasuki ruang pameran Museum Aceh. Derlaku untuk sementara waktu bukan permanen sebelum PDIA mempunyai gedung sendiri.¹²

¹²Wawancara dengan bapak Drs. Nurdin Ar M.Hum, Dosen Fakultas Adab, Pimpinan Museum Aceh, 10 November 2016

Beberapa kepala PDIA yang bersama-sama ikut mengembangkan dunia arsip, dokumentasi, dan perpustakaan di Aceh dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

N O	Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh	Masa Jabatan
1	Drs. Teuku Ibrahim Alfian, M.A	(1977-1978)
2	Aboe Bakar	(1979-1986)
3	Drs. M. Adnan Hanafiah	(1987-2006)
4	Drs. Rusdi Sufi	(2006-2012)
	Dra. Zunaimar	(2013- 2016)
6	Drs. Mawardi, M.HUM., M.A	(2016-sekarang)

Data diolah : 1 januari 2017

Pada prinsipnya kepala PDIA harus orang Unsyiah kecuali bila ada kebijakan lain dari gubernur.¹³

Saat ini PDIA memiliki 19 orang tenaga penyelenggara yang terdiri dari kepala direktur, kepala tata usaha (dibantu oleh seorang bendahara dan satu staf umum). kepala bidang dokumentasi (dibantu oleh dua orang staf). Di Bidang informasi kepala bidang informasi (dibantu oleh dua orang staf). Bidang publikasi: kepala bidang publikasi (dibantu oleh dua orang staf). Bidang digitalisasi dan Otomasi (kepala bidang otomasi dan digitalisasi dibantu oleh dua orang staf serta satu orang tenaga pengamanan, dan satu orang *cleaning service*).

¹³wawancara dengan bapak Drs. Rusdi sufi, mantan direktur Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 02 November 2016

C. Tujuan Pendirian Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh

Tujuan pendirian PDIA ini adalah sebagai upaya untuk memberikan keterangan kepada publik mengenai informasi tentang Aceh sebagai lembaga yang fokus dalam pengembangan studi tentang Aceh kepada masyarakat dari masa ke masa. Secara khusus pusat dokumentasi ini juga bertujuan:

- a. Memberikan informasi dan pengetahuan publik mengenai Aceh dan PDIA juga sebagai lembaga yang memajukan studi tentang Aceh dari berbagai perspektif kajian, di antaranya : sejarah, budaya dan kemasyarakatan.
- b. Memajukan studi tentang Aceh terutama studi tentang sejarah Aceh dan PDIA akan menjadi tempat untuk menghimpun semua dokumen dan informasi yang bisa digunakan untuk memajukan studi tentang Aceh.¹⁴
- c. Memberikan berbagai informasi, mendokumentasikan berbagai konten tentang Aceh dan melakukan pengkajian untuk kemajuan studi ilmu pengetahuan dan edukasi masyarakat.
- d. Memajukan studi mengenai Aceh dalam kedudukan dan hubungannya di wilayah nusantara dan mancanegara pada masa lalu, sekarang serta masa yang akan datang.
- e. Menyimpan berbagai sumber sejarah dan budaya Aceh yang merupakan bahagian dari informasi mengenai *identitas endatoenya Aceh*.¹⁵

PDIA dalam upaya mencapai tujuannya berusaha :

¹⁴Wawancara dengan bapak Drs. Mawardi M. Hum, kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 17 maret 2017

¹⁵Rusdi Sufi, *Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) Sebagai Tempat Penyimpanan Sumber Sejarah dan Budaya Aceh*,. Hal. 4

- a. Menghimpun dan menata segala bentuk publikasi/penerbitan berupa buku, naskah, akta, risalah, pamflet, bulletin dan sebagainya mengenai Aceh.
- b. Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan dengan membina sarana-sarana yang diperlukan seperti bidang perpustakaan dan bidang ilmiah lainnya.
- c. Menerbitkan/mempublikasikan dalam bentuk seri informasi, buku, risalah, dan lain-lain mengenai Aceh serta mengadakan hubungan tukar-menukar informasi dengan badan-badan, perkumpulan dan perorangan dengan pihak-pihak lain dalam dan luar Negeri kendatipun kerjasama itu tidak dilaksanakan dalam bentuk piagam.
- d. Menghubungi pihak-pihak yang dapat membantu PDIA dengan berbagai bentuk kerjasama guna pengembangannya dan kemajuan PDIA.¹⁶

D. Kondisi Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh Dari Tahun ke Tahun

Setiap lembaga baik itu formal maupun non formal dalam perjalanannya pasti ada beberapa kondisi yang menyebabkan tersendatnya perkembangan. Kendala itu dapat berasal dari internal maupun eksternal. Demikian pula Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh yang sudah berdiri sejak 1977 juga menghadapi beberapa kondisi selama 39 tahun berdiri dan berkembangnya PDIA. Untuk lebih rincinya dibawah akan dijelaskan beberapa kendala yang dihadapi PDIA sebagai berikut.

¹⁶*Ibid* hal. 3

Kondisi Tahun 1977-1987

Sejak awal berdiri pada tahun 1977, banyak pihak yang tidak setuju dengan penggunaan gedung bekas mess Belanda menjadi kantor PDIA. Pihak-pihak tersebut menginginkan agar gedung tersebut dijadikan rumah dinas atau *guest house*. Pada saat awal berdiri PDIA juga mengalami permasalahan seperti kekurangan dana operasional, dan belum adanya teknologi yang memadai untuk menyimpan buku-buku ataupun dokumen tua yang rentan rusak.¹⁷

Kondisi Periode Tahun 1987-1997

Pada periode 1987-1997, PDIA terus mengalami perkembangan setelah sepuluh tahun lembaga ini dibuka untuk umum, di antaranya seperti terus meningkatnya jumlah pengunjung maupun arsip-arsip bahan atau sumber informasi mengenai Aceh. Bertambahnya jumlah pengunjung yang dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah buku/monograf mengenai sejarah maupun hal lainnya tentang Aceh yang dimiliki PDIA menarik para peneliti yang mencari bahan untuk rujukan atau sumber dan masyarakat umum untuk berkunjung. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengunjung yang pada periode 1977-1987 hanya ±18.000 orang meningkat menjadi ± 24.000 orang pada tahun 2016

Pada masa periode 1987-1997 buku/monograf yang dimiliki Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) mencapai ± 10.000 exemplar mengenai tentang Aceh. Koleksi buku/monograf yang berada di pustaka dari lembaga PDIA hampir 70% mengenai sejarah, kebudayaan, kesusasteraan Aceh, dan agama Islam

¹⁷ M. Adril Septian, Skripsi *Perkembangan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA)*, Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala

yang sebagian besarnya ditulis dalam bahasa Belanda dan Inggris. Sehubungan dengan itu PDIA juga menghimpun koleksi dan menerbitkan sejumlah penerbitan yang bersifat primer maupun skunder berupa buku maupun katalog. Penerbitan berseri juga dilakukan oleh PDIA dengan mengeluarkan Seri Informasi Aceh (SIA) yang merupakan buku-buku berkarya Bahasa Belanda mengenai Aceh yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Buku SIA ini menjadi sangat prioritas sebab sumber referensi pengkajian terlengkap tentang Aceh sendiri tidak ada di Aceh ataupun di Indonesia dan itu hanya terdapat pada sumber-sumber yang berasal dari Eropa.

Permasalahan yang terjadi pada periode 1987-1997 tidak jauh berbeda dengan periode 10 tahun sejak PDIA didirikan. Kurangnya teknologi yang dimiliki PDIA untuk merawat beberapa buku, arsip dan dokumen yang ada, membuat sumber-sumber penting tersebut banyak yang rusak dan minimnya operasional juga menjadi kendala tersendiri bagi lembaga ini, selain itu tidak ada masalah berarti lagi yang dihadapi. Rusdi Sufi menjelaskan, “kendala atau masalah yang dihadapi PDIA dalam periode 1980-an sampai masuknya masa Orde Baru tidak mengalami masalah yang berarti selain hanyalah permasalahan-permasalahan kecil yang bersifat internal”.

Kondisi Periode Tahun 1997-2007

Memasuki era tahun 2000-an, tepatnya tahun 2004 sebuah bencana besar melanda Aceh yaitu gempa dan tsunami. Hal ini juga berimbas kepada PDIA, yang mana menyebabkan gedung PDIA hancur dan menghilangkan sebagian

besar koleksinya, sehingga sejak tahun 2005 untuk menjaga eksistensinya PDIA sementara waktu dipindahkan ke Museum Aceh. PDIA juga terus melakukan usaha penyelamatan dokumen-dokumen yang tersisa atau yang masih dapat dipergunakan. Oleh karena itu, mulai tahun 2005 hingga tahun 2007 PDIA mengalami kendala dalam hal pelayanan kepada masyarakat, karena belum tersedianya gedung yang representatif seperti layaknya sebuah pusat informasi.

Kondisi Periode Tahun 2007-2014

Adapun permasalahan yang dialami PDIA selanjutnya adalah pengalihan gedung PUSAT PDIA yang telah di bangun oleh BRR pada tahun 2008 menjadi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unsyiah pada tahun 2011. Padahal, berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh dan Rektor Universitas Syiah Kuala menetapkan statuta PDIA tanggal 26 Juli 1978 yang menyatakan bahwa, pendirian PDIA bertujuan untuk memajukan studi mengenai Aceh dalam kedudukan dan hubungannya di wilayah Nusantara dan Manca negara pada masa lalu, sekarang, serta masa yang akan datang (Pasal 5 Statuta PDIA tahun 1978).

Tanah dan gedung PDIA sendiri yang berada di Jln. Prof. A. Majid Ibrahim I No. 5 Banda Aceh diserahkan langsung oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh A. Muzakir Walad pada tanggal 2 September 1974 pada saat Dies Natalis Universitas Syiah Kuala yang ke XIII. Tanah dan gedung tersebut berstatus hak pakai atas nama PDIA sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Banda Aceh No. 6.

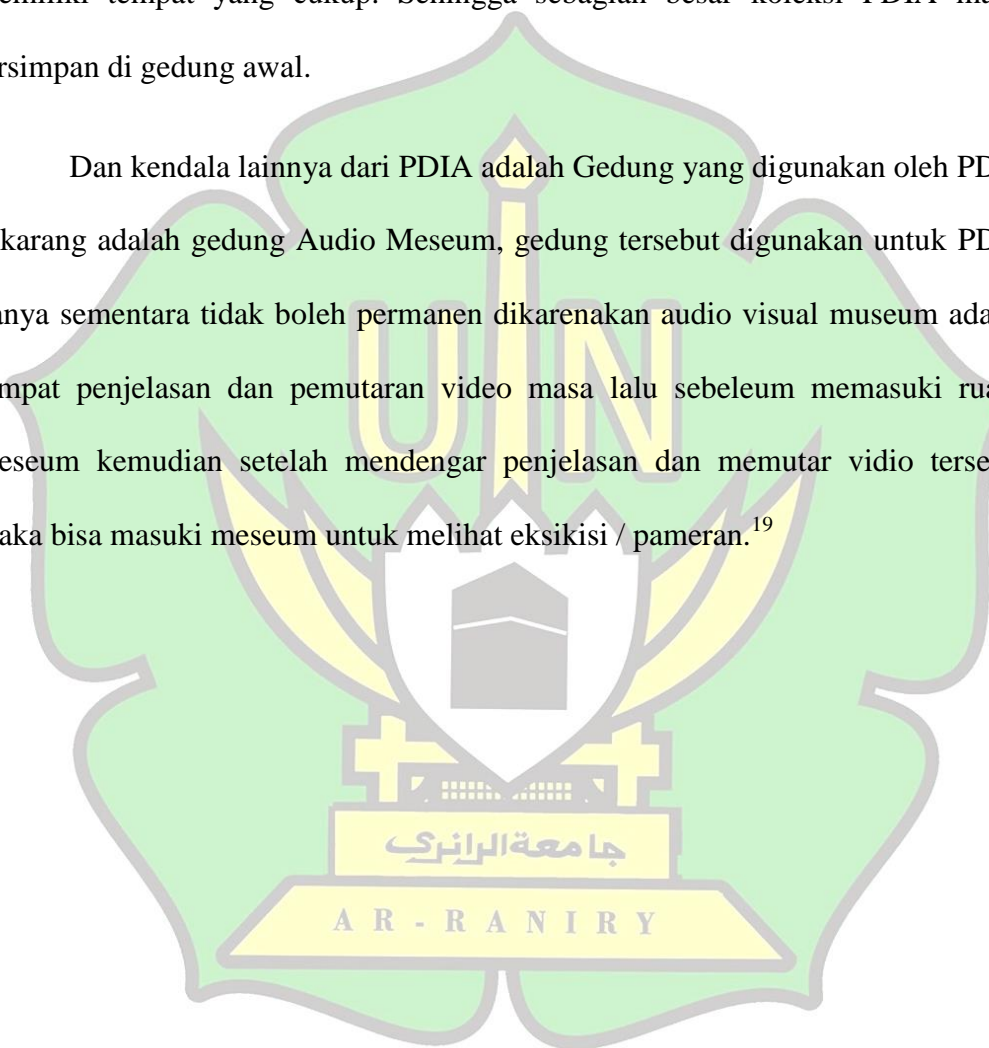
Tepatnya tahun 2011, gedung PDIA dimanfaatkan untuk sementara secara bersama yaitu dengan Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Bahagian depan gedung digunakan oleh PDIA (834 m²) sementara bagian belakang (1096 m²) termasuk lantai dua digunakan oleh Program Studi Kedokteran Gigi Unsyiah untuk ruang kuliah dan praktek kepaniteraan mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Unsyiah. Hal ini berlangsung lebih kurang tiga tahun (2011-2013), karena pertengahan Juni 2014, berdasarkan surat Gubernur Aceh No. 590/13453 tanggal 25 April 2014, gedung Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh dialih fungsikan untuk menjadi Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Unsyiah, sementara PDIA dipindahkan oleh Gubernur ke kompleks Museum Aceh, Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah, tepatnya di salah satu ruangan (11 x 11 m²) di lantai dua sisi sebelah kanan rumah Aceh (Surat Direktur PDIA kepada Gubernur Aceh, 28 Oktober 2015).

Selain permasalahan di atas, PDIA juga mengalami masalah pendanaan seperti dana yang dialokasikan oleh pemerintah Aceh sekitar Rp. 100.000.000,00 hanya cukup untuk membayar gaji karyawan saja. Sedangkan PDIA juga membutuhkan dana untuk keperluan lainnya, seperti pemeliharaan buku dan dokumen, biaya operasional dan lain-lain.¹⁸ Adapun kendala lain yang dihadapi Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh adalah mengenai dana dari Gubernur Aceh untuk PDIA pada tahun 2015 yang sebesar Rp. 500.000.000,00 yang dititipkan pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh tidak dapat dicairkan melalui

¹⁸M. Adril Septian, Skripsi *Perkembangan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA)*, Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala

APBA (Anggaran Pendapatan Belanda Aceh), sehingga biaya operasional dan honor para penyelenggara PDIA tertunggak selama 11 bulan. Selain itu keadaan gedung yang hanya seluas 11 x 11 m² membuat mobilitas Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh menjadi terbatas. Bahkan untuk menyimpan koleksinya saja tidak memiliki tempat yang cukup. Sehingga sebagian besar koleksi PDIA masih tersimpan di gedung awal.

Dan kendala lainnya dari PDIA adalah Gedung yang digunakan oleh PDIA sekarang adalah gedung Audio Meseum, gedung tersebut digunakan untuk PDIA hanya sementara tidak boleh permanen dikarenakan audio visual museum adalah tempat penjelasan dan pemutaran video masa lalu sebelum memasuki ruang meseum kemudian setelah mendengar penjelasan dan memutar vidio tersebut maka bisa masuki meseum untuk melihat eksikisi / pameran.¹⁹



¹⁹Wawancara dengan bapak Drs. Nurdin AR. Dosen Fakultas Adab, Pimpinan Museum Aceh, 10 November 2016

BAB III

HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian PDIA dimulai dari pelestarian dokumen-dokumen bersejarah, langkah-langkah pelestarian dokumen bersejarah, pemberdayaan dokumen untuk kebutuhan publik, respon masyarakat terhadap PDIA, dan respon pemerintah terhadap PDIA.

A. Pelestarian Dokumen-Dokumen Bersejarah

Dalam usaha meningkatkan pembangunan di segala bidang kebudayaan, kita masih dihadapi pada beraneka ragam corak warisan kebudayaan yang masih belum terungkap. Warisan budaya nasional yang merupakan peninggalan masa lampau masih bertebaran diseluruh penjuru Indonesia, baik yang ada ditangan masyarakat tanpa perawatan khusus apalagi pemeliharaan yang baik, maupun yang masih belum diketahui keberadaannya. Salah satu yang masih banyak berada di tangan masyarakat adalah dokumen-dokumen dan naskah-naskah. Dokumen merupakan salah satu warisan budaya yang amat penting, dokumen dan naskah merupakan mata rantai untuk kita dimasa sekarang menuju masa lalu yang bisa memberi informasi tentang perkembangan ilmu, teknologi dan sejarah dimasa lampau.²⁰

Seiring berjalannya waktu, sesuatu yang klasik pasti akan terus ditinggalkan oleh orang-orang yang tidak mengerti manfaatnya begitu pula

²⁰Muin Umar dkk, *identifikasi Naskah, koleksi musem Negeri Banda Aceh*, (Banda Aceh: Departemen pendidikan dan kebudayaan direktorat jenderal kebudayaan, 1980), hal, 1.

dengan dokumen di PDIA. Apalagi dalam pandangan orang awam, yang menganggap dokumen dan naskah hanyalah kumpulan buku-buku tua yang telah lapuk.

Dokumen sesuai dengan namanya yang kekonon yang memang sepantasnya disimpan di Museum, sejajar dengan benda-benda klasik lain. Namun, Dokumen dalam artian benda mati yang seharusnya hanya disimpan dalam lemari dan dikunci rapat-rapat. Sepatutnya kita sebagai generasi muda harus menghidupkannya, dalam artian bukan hanya diselamatkan dan dirawat saja akan tetapi diolah kemudian disajikan untuk konsumsi masyarakat umum, baik pembicaraan maupun peneliti untuk terwujudnya keinginan tersebut, tentu saja sudah semestinya diperlukan keahlian yang memadai dalam hal aksara dan bahasa yang digunakan dalam dokumen dan naskah, serta ketukan dan kemauan yang keras dari pengelolaannya.²¹

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan pilaku kehidupan manusia bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional.²²

²¹Mulyati Tahir, "naskah kuno merupakan Sumber Sejarah dan Ilmu Pengetahuan" Dalam *Buletin Triulan*, (Diponegoro: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Meseum Negeri Povinsi Kaltin "Mulawarma," 1996), hal. 4.

²²Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, *undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya*, (Aceh: Dinas Kebudayaan dan PariwisataAceh, 2012), hal. 1.

Dokumen-dokumen klasik merupakan benda cagar budaya yang sepatutnya dilestarikan. Adapun kriteria cagar budaya adalah :

- a. Berusia lima puluh tahun atau lebih atau mewakili suatu zaman/era.
- b. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama atau kebudayaan.
- c. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Adapun jenis bahan yang digunakan untuk penulisan dokumen klasik beragam dan mudah rusak. Jenis bahan yang digunakan ialah : a) kertas, b) kulit kayu, c) kulit binatang. Sedangkan jenis kertas-kertas yang sering digunakan dinusantara sejak abad ke 19 menurut Uka Trandasasmita merupakan impor dari Eropa yang memiliki ciri-ciri sendiri. Antara lain, dibubuhi cap yang sering dikenal sebagai *watermark*, terdapat beragam lambang, di antaranya *arms of amsterdam* (dua ekor singa bermahkota saling menghadap mengapit perisai bermahkota), bunga lily dalam perisai bermahkota, jangkar, wajah manusia dan masih banyak lagi lambang-lambang lainnya.²³

Berdasarkan jenis bahan di atas, maka koleksi dokumen klasik merupakan salah satu benda cagar budaya organik(berasal dari jasad hidup). Pada umumnya koleksi yang terbuat dari bahan organik lebih peka terhadap lingkungan jika dibandingkan dengan jenis koleksi yang terbuat dari bahan an-organik (berasal dari susunan stuktur beberapa mineral alam). Hal ini disebabkan oleh unsur

²³Uka Tjandrassa, *kajian naskah-naskah klasik dan peneapannnya bagi kajian sejarah islam diindonesia*, (jakarta : puslitbang lektur keagamaan, 2006), hal. 11 & 14.

pembentukannya, sehingga menyebabkan bahan organik mudah mengalami pelapukan/ pembusukan.

Penyebab-penyebab kerusakan dokumen ialah :

1. Kerusakan yang disebabkan dari dalam(faktor internal). Kerusakan dari dalam dapat disebabkan oleh unsur-unsur dari kertas dokumen, tinta dan pasta atau lem yang digunakan :

- Kertas, bahan baku kertas dapat dibuat dari bahan-bahna seperti kapas, flas, meang, kayu dan lai-lain. Dari apapun kertas dibuat, cellulose didalamnya mengandung beberapa sifat pengawet yang akan menghancurkan kertas itu sendiri.
- Tinta, alat tata usaha berupa caian dalam berbagai vwarna yang digunakan untuk membubuhkan tulisan di atas ketas. Apabila tinta yang dipergunakan kurang baik dapat merusak tulisan atau kertas naskah.
- Pasta atau lem, agar kertas-kertas dokumen atau naskah tidak mudah rusak pergunakan lem yang baik, jangan menggunakan perekat yang terbuat dari getah arab atau *cellulose tape*.²⁴

1. Kerusakan akibat serangan dari luar (faktor eksternal)

- Suhu dan kelembaban udara

Suhu yang terlalu rendah serta kelembaban udara yang melebihi 6lima persen menyebabkan kertas naskah mudah lapuk, berjamur dan

²⁴Rabiatur addawiyah, "Pelestarian Arsip,"Triwulanan, januari-maret 2012, hal 16-17

lembab.²⁵ sedangkan suhu yang tinggi dan kelembaban yang rendah akan menyebabkan kertas naskah klasik menjadi rapuh dan tegang. Untuk menghindari hal tersebut terjadi, maka di usahakan agar kondisi di ruangan penyimpanan naskah klasik selalu berada dalam keadaan stabil, yaitu 65°-75°F dan kelembaban udara 50-65%. Untuk mengatur kelembaban udara, temperatur udara untuk mengurangi banyaknya debu dapat dipasang AC, yang dihidupkan 24 jam/hari. Silica gel juga berguna untuk mengatur kelembaban dalam ruangan penyimpanan dokumen.

- Keasamaan dan cahaya

Keasaman bisa menyebabkan unsur-unsur serat kertas mengandung selulosa akan menjadi hidroselulosa sehingga menyebabkan kertas dokumen / naskah menjadi lapuk. Terdapat dua jenis cahaya yang menyebabkan kertas dokumen/naskah mudah rusak, cahaya matahari dan cahaya lampu. Diusahakan agar sinar matahari tidak jatuh langsung pada bundel-bundel dokumen karena membahayakan kertas dokumen.

- Polusi udara

Debu dan gas yang ditiup angin akan melekat pada kertas dokumen, sehingga menyebabkan polusi udara yang akan mengotori dokumen. Apabila debu-debu ini terus dibiarkan akan tumbuh jamur dan akan merusak kertas dokumen.

- Bencana Alam dan Manusia

²⁵ Wawancara dengan Zikrayanti M.lis, dosen D3 Ip, 1 maret 2017

Bencana alam dapat menyebabkan kerusakan atau musnahnya dokumen dan naskah secara tidak sengaja, seperti banjir, kebakaran dan longsor/gempa. Manusia juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan pada dokumen klasik. Salah perlakuan dari pewaris, penyimpan dokumen tidak pada tempatnya yang menyebabkan dokumen menjadi kotor, serta apabila dokumen disimpan dengan menumpuk secara banyak-banyak. Kondisi yang lembab di tempat penyimpanan dokumen akan mudah berkembang baik jasad renik, seperti kutu-kutu, silverfish dan sebagainya.²⁶

Dari semua faktor di atas, salah satu faktor yang tidak dapat dihindari adalah faktor usia dari dokumen itu sendiri. Dokumen klasik merupakan warisan budaya Islam yang diperoleh di PDIA sudah berumur ratusan tahun. Maka, mengingat banyak faktor yang bisa menyebabkan kerusakan bahkan musnahnya dokumen klasik yang berada di PDIA perlu adanya pelestarian secara rutin. Hal tersebut disebabkan kekhawatiran terhadap hilangnya dokumen-dokumen pada tragedi tsunami yang memiliki nilai sejarah, maka dilakukan upaya untuk melestarikan dokumen-dokumen yang masih ada dan sudah di *gitalisasi* dengan baik oleh berbagai pihak.

Tragedi gempa bumi dan Tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang dengan mudah memusnahkan secara total warisan budaya. Bercermin pada hilangnya semua dokumen koleksi PDIA akibat musibah tersebut. Namun, dibalik musibah pasti ada hikmah juga, kunjungan sekaligus bantuan dari dalam maupun luar negeri menghujani bumi Aceh, baik dari segi moral maupun

²⁶Wan Ali hj. Wan Mamat, *Pemeliharaan Buku dan Manuskrip*, (Kuala Lumpur, Ampang Press, 1988), hlm. 57-60.

material. Begitu juga dalam hal pelestarian dokumen di Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh yang mendapat perhatian khusus dari berbagai lembaga.

A. Langkah - Langkah Pelestarian Dokumen Bersejarah

Mengingat dokumen atau naskah yang tidak bisa bertahan ratusan tahun tanpa pemeliharaan yang cermat dan perawatan yang khusus seperti diluar negeri. Pemeliharaan agar dokumen tidak cepat rusak, antara lain : dilakukan mengatur suhu tempat penyimpanan naskah, sehingga tidak cepat lapuk, melapisi kertas-kertas yang sudah lapuk dengan kertas khusus dan menyemprot dokumen-dokumen dengan bahan kimia sehingga dapat mencegah dari serangga yang memakan kertas. Namun tinta-tinta yang memecah dan kertas yang cepat menguning sulit untuk dihindari.²⁷

Adapun pelestarian dokumen adalah seperti di bawah :

- Menjaga kondisi lemari / *viktrin* ruangan tempat penyimpanan dokumen agar tetap bersih, mengatur suhu dan kelembaban udara dengan menggunakan *silicia-gel*, serta menggunakan pendingin ruangan (AC).
- Membersihkan dokumen dari kotoran dan debu menggunakan kuas yang lembut dengan cara membuka halaman dokumen / naskah yang terlipat, dan apabila terdapat jamur / *inserk* di bersihkan dengan cara mengoleskan alkohol. Teknik lain yang digunakan menghapus karet yang digunakan menghapus karet yang telah dipart.

²⁷H. Edwar Djamaris, *Metode Penelitian Filologi*, (Jakarta, CV Manasco, 2002), hlm. 3-

- Tahap selanjutnya, koleksi dokumen/ naskah yang sudah dikonservasi kemudian ditata ulang dan dimasukkan ke dalam amplop, disertai dengan memasukkan juga bahan pengawet alami berupa cengkeh dan lada untuk menjauhkan dari binatang pemakan kertas serta memelihara dan menghindari insect dan sejenisnya. Pelestarian dalam bentuk digitalisasi dilakukan agar kertas-kertas dokumen/ naskah yang rentan dengan kerusakan tidak sering dipegang oleh para peneliti.²⁸

Tujuan pelestarian dokumen dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Menyelamatkan informasi dokumen.
- Menyelamatkan fisik dokumen.
- Mengatasi kendala kekurangan uang.

B. Pemberdayaan Dokumen Untuk Kebutuhan Publik

Pemberdayaan dokumen untuk kebutuhan masyarakat yang ada di Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh ada dua cara yaitu :

- a) Pustaka digital, mempercepat perolehan informasi: dokumen yang tersimpan dalam CD (*Com-pact Disc*) sangat mudah untuk diakses, baik dari jarak dekat maupun jarak jauh. Sehingga pemakaian dokumen menjadi lebih optimal. dan ada juga yang berbentuk artikel, dan ada juga dengan bentuk facebook mengenai koleksi yang ada di Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.

²⁸Hasil wawancara dengan Sri Hardiyanti Lukman S.IP., M.Pd, Staf Perpustakaan Fakultas Adab Humaniora, 1maret 2017

- b) Kalau secara langsung yaitu pengunjung langsung datang ke Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh dengan melihat langsung secara fisik.²⁹

C. Eksistensi Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh

PDIA sebagai salah satu lembaga milik pemerintah dan swasta sebagai tempat penyimpanan menjaga keamanan dan ke-otentikan dokumen-dokumen bersejarah tentu banyak hal yang harus kita kaji, karena PDIA merupakan sebuah lembaga yang kompleks. Sejak awal berdiri hingga sekarang keberadaan PDIA terus mengalami berbagai kendala dan hal tersebut tentu memiliki dampak, baik positif maupun negatif. Penulis telah mengelompokkan beberapa aspek yang akan dibahas mengenai Eksistensi PDIA sejak 1977 hingga 2016, yaitu :

PDIA mulai mengumpulkan koleksi sejak tahun 1978 yang mana pada tahun tersebut statuta PDIA baru keluar. Pengumpulan koleksi tersebut terus berlanjut hingga tahun 2004 yang mana merupakan donasi baik dari para sejarawan, Pemerintah Belanda, maupun pihak yang peduli terhadap sejarah Aceh. Koleksi tersebut di antaranya merupakan buku/monograf, dokumen, dan digital.³⁰

Dalam meningkatkan pelayanan pada pengguna/user, PDIA telah berhasil menghimpun lebih kurang 12 ribu judul buku dan bahan bacaan meliputi buku/monograf juga terdapat peta-peta yang umumnya dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda semasa pendudukannya di Aceh, yang di antaranya telah langka,

²⁹Wawancara dengan Inin salah satu staf Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 17 maret 2017

³⁰M. Adril Septian, Skripsi *Perkembangan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA)*, Universitas Syiah Kuala

laporan tahunan dari dinas-dinas dan jawatan-jawatan yang ada di Aceh, hasil penelitian, lembaran negara, terbitan berkala, dan lain-lain.

Tujuh puluh persen (70%) dari koleksi pustaka PDIA adalah mengenai sejarah, kebudayaan, kesusasteraan Aceh, dan agama Islam yang sebagian besar ditulis dalam bahasa Belanda dan Inggris. Selain itu terdapat pula buku-buku hasil photocopy tentang Aceh dalam bahasa Inggris, koleksi Cornell University-Itacha New York yang merupakan bantuan dari *Mobil Oil-Indonesia Inc.* Selain bahan dalam bentuk *printed* (cetak) tersebut di atas, PDIA juga mengoleksi 1400 judul karya rekam (*non printed*) dalam bentuk *microfilm* tentang sejarah dan kebudayaan Aceh dan dalam bentuk *microfilm* tentang surat kabar lama yang pernah terbit di Aceh (sebelum kemerdekaan).

Selain karya rekam tersebut di atas PDIA juga mengoleksi karya rekam (*audio visual*) dalam bentuk *oral history* (sejarah lisan) tentang masa pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan. Selain itu terdapat satu buah karya rekam beserta transkrip hasil wawancara antara PDIA dengan almarhum H. Djuned Jusuf Indokolim, Ketua GASIDA (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh) tentang pembelian pesawat pertama Republik Indonesia yaitu pesawat RI 001 Seulawah yang disumbangkan oleh rakyat Aceh untuk pusat dalam rangka operasional Pemerintah RI yang baru terbentuk. Kemudian selain rekaman suara, PDIA juga mengoleksi rekaman dalam bentuk *audio visual*, antara film-film mengenai pendirian monumen Belanda di Taman Sari Banda Aceh. Sebagian besar dari koleksi tersebut di atas berasal dari KITLV di Leiden, dan KIT di Amsterdam dan beberapa perorangan di negeri Belanda.

Selain itu juga tersimpan sejumlah foto-foto masa pendudukan Belanda di Aceh, masa revolusi kemerdekaan, dan masa pergolakan DI/TII, serta sejumlah foto-foto mutakhir tentang Aceh. Selain karya cetak, dan karya rekam tersebut di atas, PDIA juga mengoleksi manuskrip/naskah klasik, dalam aksara Arab Jawi (Bahasa Melayu) dan Arab Jawo (Bahasa Aceh), yang memuat tentang agama Islam, kisah para raja dan sultan, kesusasteraan, ilmu ketabiban (obat-obatan), ilmu falak dan sebagainya.

Selain itu PDIA juga mengoleksi tidak kurang dari 54 naskah arsip-arsip yang meliputi Handelingen Volksraad yang rata-rata setebal enam sampai tujuh sentimeter per naskah. Sejak Volksraad berdiri pada tahun 1918 sampai dengan masa berakhir pemerintah Hindia-Belanda (1942). Handelingen tersebut antara lain memuat kegiatan para anggota Volksraad dari Aceh pada masa Hindia-Belanda yaitu Teuku Chik Muhammad Thayeb Peureulak (ayahanda mantan Gubernur Aceh Hadi Thayeb), Teuku Nyak Arief (salah satu pahlawan nasional RI), Tuanku Mahmud. Juga didalamnya termasuk duplikat surat Prince Maurits dari negeri Belanda kepada Sultan Saidil Mukammal (kakek Sultan Iskandar Muda dari pihak ibu), dan surat King James dari Inggris kepada Sultan Iskandar Muda, juga surat Sultan Iskandar Muda untuk King James.

Namun sayangnya, peristiwa tsunami yang terjadi pada tahun 2004 telah menghancurkan gedung PDIA, dan juga menghilangkan sebagian besar koleksi. Koleksi tersebut ada yang hanyut dibawa air, dan ada pula yang selamat namun mengalami kerusakan karena terendam air. Namun pihak PDIA terus berusaha

untuk melengkapi kembali koleksi mereka, baik dengan cara mencetak ulang dan memperbaiki kembali dokumen-dokumen yang telah rusak.

Pasca Gempa Bumi dan Tsunami pada 26 Desember 2004 yang melanda Aceh dan juga turut menghancurkan gedung beserta seluruh koleksinya, sejak tahun 2005 PDIA mulai kembali membangun dan melengkapi koleksi-koleksi PDIA yang telah hilang ketika Tsunami tahun 2004. Sampai dengan tahun 2016, PDIA telah mengumpulkan dan mengoleksi: buku (*printed*) sebanyak 1881 judul, buku langka mengenai Aceh sebanyak 99 judul, buku berformat E-Book (elektronik book) sebanyak 3687 judul, dan buku elektronik langka (*e-rare book*) mengenai Aceh sebanyak 687 judul.

Selain buku, PDIA juga telah mengoleksi dokumen-dokumen tanah di Aceh pasca Tsunami dari sembilan kabupaten/kota (379 desa) yang berjumlah 94.874 dokumen. Selain bahan pustaka tersebut di atas, PDIA juga mengoleksi dokumen lainnya yang berkenaan dengan: Perang Aceh, Politik dan Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian, Pembangunan, Kegiatan Keagamaan, Kebudayaan, Perikanan, Industri, Perdagangan, Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Infrastruktur, dan Transportasi, yang jumlah seluruhnya: 472 dokumen. Dokumen lain-lain: 87 dokumen. Total dari keseluruhan dokumen koleksi PDIA kini berjumlah 95.433 dokumen.³¹

Selain mengoleksi buku dan dokumen, PDIA kini juga memiliki beragam koleksi cetak dan elektronik lainnya, meliputi : foto yang berkenaan dengan Aceh:

³¹ Wawancara dengan Zainal Abidin Staf Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh bidang dokumentasi, 17 maret 2017

Sejarah, Kebudayaan, Islam, dan lain sebanyak 1.292 judul foto, Peta Aceh: Peta lama dalam bentuk *printed* sebanyak 17 peta, Peta setelah Tsunami berjumlah 358 peta.

Sedangkan dalam hal pengoleksian manuskrip Aceh berbasis (elektronik/digital), kini PDIA memiliki 439 judul naskah manuskrip yang berbentuk hibah dan 510 naskah manuskrip merupakan hasil pembelian oleh PDIA. Total keseluruhan naskah manuskrip berbentuk digital/elektronik yang dikoleksi oleh PDIA kini 949 judul naskah.³²

(1) Koleksi Buku/Monograf

- a) Buku/monograf (printed/cetak) : 1881 judul
- b) Buku/monograf langka (printed/cetak) : 99 judul
- c) Buku/monograf (elektronik/digital) : 3656 judul
- d) Buku/monograf langka (elektronik/digital): 656 judul

(2) Koleksi Dokumen

- a) Dokumen tanah di Aceh pasca Tsunami 2004 dari sembilan kabupaten/kota (379 desa) berjumlah 94.874 dokumen.
- b) Dokumen yang berkenaan dengan: Perang Aceh, Politik dan Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian, Pembangunan, Kegiatan Keagamaan, Kebudayaan, Perikanan, Industri, Perdagangan, Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Infrastruktur, dan Transportasi. Jumlah seluruhnya 472 dokumen.

³² Wawancara dengan M Tanzil Maulana A.Md, Staf PDIA Bidang Publikasi, 17 maret 2017

- c) Dokumen lain-lain: 94 dokumen.(Total: 95.440 dokumen).
- (3) Foto yang berkenaan dengan Aceh: Sejarah, Kebudayaan, Islam, dan lain-lain.
(Total: 1.292 judul).
- (4) Peta Aceh: Peta lama (13 peta), Peta setelah Tsunami (358 peta). (Total: 371 peta).
- (5) Koleksi manuskrip Aceh (elektronik/digital): Hadiah (483 naskah), pembelian (557 Naskah). (Total : 1.040 naskah).

Total keseluruhan koleksi PDIA saat ini adalah 104.657 koleksi.³³

Pada tahun 2013 Yayasan *Peucut-Fond* melalui perwakilan Drs. Rusdi Sufi menarik kembali semua dokumen yang dipinjamkan sementara ke PDIA. Semua dokumentasi ini disimpan oleh Drs. Rusdi Sufi sambil menunggu keputusan *Peucut-Fonds* mengenai tempat penyimpanan terakhir dokumen tersebut. Adapun koleksi yang ditarik tersebut antara lain 28 judul dokumen, 53 buah foto, dan 38 buah peta.

Untuk lebih jelas mengenai koleksi PDIA dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Koleksi PDIA dari Tahun 1978-2014

Koleksi	Tahun			
	1978-1988	1988-1998	1998-2008	2008-2014
Buku/monograf	± 5.000	± 10.000	12.000	6.292
Dokumen	-	-	1.400	95.440
Foto	-	-	1.292	1.292
Peta	-	-	375	371

³³ *Ibid*

Manuskrip (digital)	-	-	949	1.040
Jumlah	-	-	16.016	104.435

Sumber : Data Diolah (28 Maret 2016)

Maka, jika dilihat dari tabel di atas, dari segi koleksi PDIA tidak mengalami perkembangan, justru cenderung berkurang. Hal ini dapat dilihat seperti koleksi buku/monograf dari 1.2000 judul menjad 6.292 judul saja. Begitu pun koleksi yang lain yang semakin berkurang. Hal ini tentu imbas dari bencana gempa dan tsunami Aceh yang terjadi pada 2004 silam. Hanya koleksi dokumen dan manuskrip digital saja yang menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan.

Selain menghimpun koleksi, PDIA juga menerbitkan sejumlah penerbitan antara lain berupa buku Perang Kolonial Belanda di Aceh, Wajah Aceh dalam lintasan Sejarah, Hukum Adat Pertanahan, Benteng Kesultana Aceh: Kajian Filologi, Arkeologi dan Topografi, dan lain-lain. Selain menerbitkan penerbitan yang bersifat primer, PDIA juga menerbitkan penerbitan yang bersifat sekunder, yaitu dua judul katalog manuskrip perpustakaan Tanoh Abee Aceh Besar. Jilid I (1980) yang disusun oleh Drs. Wamad Abdullah, MA dan Tgk. M. Dahlan Al Fairusy, Jilid II (1992) yang disusun oleh Dra. Zunaimar dan Tgk. M. Dahlan Al Fairusy, dan dicetak ulang taun 2014.³⁴

³⁴M. Adril Septian, Skripsi *Perkembangan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA)*, Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala

Selain itu, PDIA menerbitkan juga penerbitan berseri yang diberi nama Seri Informasi Aceh (SIA) yang pada umumnya merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia dari karya-karya berbahasa Belanda mengenai Aceh yang ditulis oleh orang-orang Belanda pada masa pendudukannya di Aceh. Terjemahan itu menjadi prioritas karena untuk pengkajian tentang Aceh pada saat itu referensi sumber terlengkap hanya terdapat pada sumber-sumber Eropa, karena ketiadaan sumber-sumber lainnya baik di Aceh maupun di Indonesia.

D. Respon Masyarakat Terhadap Pusat Dokumentasi Informasi Aceh

a) Jumlah pengunjung yang datang selama tahun 1977-2014

Sejak diresmikan pemakaiannya untuk umum pada tanggal 3 September 1977 PDIA sebagai sebuah lembaga yang melayani publik menerima kunjungan dari siapa saja yang ingin membaca buku, melakukan penelitian ataupun melihat-lihat koleksi yang ada. Pengunjung PDIA rata-rata adalah mahasiswa, dosen, peneliti, anak sekolah, masyarakat peminat, pegiat dan pemerhati sejarah serta masyarakat awam.

Pada tahun awal berdirinya PDIA, dalam sehari mereka hanya mendapatkan pengunjung sekitar 6 hingga 8 orang. Namun rata-rata pengunjungnya adalah peneliti ataupun pegiat sejarah.³⁵ Untuk melihat perkembangan pengunjung, maka dibutuhkan data berapa banyak orang yang

³⁵M. Adril Septian, Skripsi *Perkembangan* Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA), Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala

berkunjung ke PDIA setiap harinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2Data Pengunjung PDIA dari tahun 1977-2014

Tahun	Jumlah Pengunjung
1977-1987	± 18.000 orang
1987-1997	± 24.000 orang
1997-2004	± 25.000 orang
2004-2008	-
2009-2014	±4574 orang
Jumlah	± 71.574 orang

Sumber : Data pengunjung PDIA

Jika dilihat dari tabel di atas pengunjung PDIA terlihat mengalami perkembangan dari tahun 1977 hingga 2004. Namun dimulai tahun 2004 hingga tahun 2008 PDIA tidak ada pengunjung. Karena pada kurun tahun tersebut PDIA sedang dalam masa pemulihan pasca gempa dan tsunami Aceh. Baru kemudian pada tahun 2009 Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh mulai menerima pengunjung kembali setelah mendapatkan gedung pinjaman sementara di Museum Aceh. Karena itu penulis berkesimpulan bahwa PDIA tidak mengalami perkembangan dari segi pengunjung.

b) Respon pengunjung PDIA

Pengunjung PDIA hanya memberikan saran untuk PDIA harus memiliki perkembangan dari segi bahan pustaka yaitu koleksi PDIA tidak mengalami perkembangan, justru cenderung berkurang. Hal ini dapat dilihat seperti koleksi buku/monograf yang kini hanya tersisa 6.292 judul saja. Begitu pun koleksi yang lain yang semakin berkurang. Hal ini tentu imbas dari bencana gempa dan

tsunami Aceh yang terjadi pada 2004 silam. Hanya koleksi dokumen dan manuskrip digital saja yang menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan.

Pengunjung berharap PDIA supaya memperbanyak buku-buku dan koleksi dokumentasi yang lebih banyak lagi karena sangat sedikit saat ini bahan pustaka yang ada di PDIA³⁶ dan jika dilihat dari segi gedung PDIA itu sendiri sangat memerlukan gedung yang berfasilitas yang bagus, sebagaimana gedung PDIA sejak pertamakali berdiri dengan fasilitas yang bagus sebagaimana layaknya sebuah gedung yang memberikan informasi kepada masyarakat, PDIA memiliki gedung dan tanah sendiri yang mana berstatus hak pakai atas nama PDIA dan memiliki fasilitas antara lain sebuah gedung beserta enam unit (mess), yang diperuntukkan bagi peneliti luar yang melakukan penelitian di PDIA, beserta mobiler dan sejumlah alat operasional lainnya.

PDIA memberikan pelayanan kelas VIP bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian disana. Mess yang disediakan mempunyai fasilitas yang lengkap demi kenyamanan para peneliti. Selain itu Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh juga memiliki galeri, depot buku dan *showroom* karya non cetak dan non rekam, setelah terjadinya gempa dan Tsunami melanda gedung Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh yang beserta isinya maka kegiatannya dipindahkan untuk sementara waktu di Museum Negeri Aceh, jalan Sultan Alaidin Mahmud Syah, Banda Aceh dengan fasilitas yang sangat terbatas, hal ini berbanding terbalik dengan fasilitas yang mereka miliki pada saat sebelum

³⁶Wawancara dengan Liawati, salah satu pengunjung Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, tanggal 12 maret 2017.

terjadinya tsunami. Saat ini mereka bahkan tidak memiliki gedung sendiri, luas ruangan yang hanya 11 x 11 m² bahkan tidak cukup untuk menyimpan semua koleksi mereka

E. Respon pemerintah terhadap Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh

a) Pembangunan

Saat masih berlokasi di Jln. Prof. A. Majid Ibrahim I. No 5 (1977-2004) PDIA memiliki gedung dan tanah sendiri yang mana berstatus hak pakai atas nama PDIA sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Banda Aceh No.6. Pada saat itu fasilitas yang dimiliki PDIA antara lain sebuah gedung beserta enam unit kamar (mess), yang diperuntukkan bagi peneliti luar yang melakukan penelitian di PDIA, beserta mobiler dan sejumlah alat operasional lainnya. PDIA memberikan pelayanan kelas VIP bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian disana. Mess yang disediakan mempunyai fasilitas yang lengkap demi kenyamanan para peneliti. Selain itu PDIA juga memiliki galeri, depot buku dan showroom karya non cetak dan non rekam.³⁷

Terjadinya Gempa Bumi dan Tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 yang meluluhlantakkan seluruh gedung PDIA beserta isinya, sehingga sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, dalam usaha pemeliharaan eksistensi PDIA, kegiatannya dipindahkan untuk sementara waktu di Museum Negeri Aceh, jalan Sultan Alaidin Mahmud Syah, Banda Aceh dengan fasilitas

³⁷Wawancara dengan Drs. Rusdi Sufi, Pimpinan Kherkhof (mantan pimpinan PDIA), 02 November 2016

yang sangat terbatas. Pada awal Januari 2008 kegiatan kembali dipindahkan ke Mess Pusat PDIA yang dibangun di areal bekas gedung PDIA yang hancur akibat gempa dan tsunami.³⁸

Pembangunan mess itu dilakukan oleh Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (BRR NAD dan Nias). Selain pembangunan tersebut, pada awal bulan April 2008 BRR NAD dan Nias membangun pula gedung kantor PDIA pengganti gedung yang telah hancur. Pada tahun 2009 PDIA telah melakukan kembali kegiatan di gedung kantor yang baru. Selain pembangunan-pembangunan dimaksud BRR NAD dan Nias juga membantu pengadaan buku-buku untuk koleksi perpustakaan selain pengadaan yang berasal dari PDIA sendiri. PDIA juga memperoleh bantuan untuk koleksi dokumentasi dalam jumlah terbatas dari *Stichting Peutjut Fonds* di Negeri Belanda.

Pada saat gedung PDIA dialih fungsikan menjadi Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Unsyiah pada pertengahan Juni 2014, sementara PDIA dipindahkan oleh Gubernur ke kompleks Museum Aceh, Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah, tepatnya di salah satu ruangan (11 x 11 m²) di lantai dua sisi sebelah kanan Rumoh Aceh. Kondisi gedung yang sempit itu membuat mobilitas PDIA menjadi terbatas. Bahkan untuk menyimpan koleksinya saja tidak memiliki

³⁸*Ibid*

tempat yang cukup. Sehingga sebagian besar koleksi PDIA masih tersimpan di gedung awal.³⁹

Secara lengkapnya mengenai sarana dan pra sarana PDIA dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Sarana dan Pra-sarana PDIA dari tahun 1977-2014

No.	Sarana dan Pra-sarana	Tahun					
		1977-1987	1987-1997	1997-2004	2005-2008	2008-2011	2011-2014
1	Gedung	1	1	1	-	1	1
2	Toilet	5	5	5	-	5	-
3	R. Direktur	1	1	1	-	1	1
4	R. Karyawan	1	1	1	-	1	1
5	Kafetaria	1	1	1	-	1	-
6	Perpustakaan	1	1	1	-	1	1
7	R. Tata Usaha	1	1	1	-	1	-
8	R. Sekretaris	1	1	1	-	1	-
9	R. Galeri	1	1	1	-	1	-
10	Kamar Peneliti	6	6	6	-	6	-

Sumber: Data gedung PDIA

Dari tabel di atas dapat dilihat, dari tahun 1977 hingga 2004 merupakan sarana dan pra sarana yang dimiliki PDIA saat masih menempati gedung awal yang merupakan bekas bangunan Belanda. Gedung yang digunakan oleh PDIA pertama kali merupakan bekas kediaman Asisten-Resident *terbeschikking* pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Gedung yang dihibahkan oleh Pemerintah Aceh yang pada saat itu gubernurnya adalah Abdullah Muzakir Walad, memiliki luas $\pm 1000 \times 800 \text{ m}^2$. Gedung tersebut memiliki satu ruang Direktur, ruang karyawan, satu unit kafetaria, perpustakaan, ruang tata usaha, ruang sekretaris,

³⁹ Wawancara dengan Drs. Rusdi Sufi, Pimpinan Kherkhof (mantan pimpinan PDIA), 02 November 2016

ruang galeri, enam unit kamar peneliti, serta lima buah toilet. Penggunaan gedung PDIA tersebut bertahan hingga tahun 2004 ketika tsunami melanda provinsi Aceh dan gedung ini mengalami kerusakan yang sangat parah. Sehubungan dengan itu setelah peristiwa tsunami Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh mengalami ke-*vacuum*-an hingga tahun 2005.

Kerusakan yang dialami oleh PDIA membuat lembaga ini untuk sementara dipindahkan ke Museum Aceh sambil melakukan usaha penyelamatan dokumen-dokumen yang tersisa atau yang masih dapat dipergunakan. Oleh karena itu, mulai tahun 2005 hingga 2008 PDIA tidak memberikan pelayanan untuk umum.⁴⁰

PDIA mulai beroperasi kembali pada tahun 2008 setelah mendapatkan gedung bantuan dari BRR. “Pada awal Januari 2008 kegiatan kembali dipindahkan ke Mess PDIA yang dibangun di areal bekas gedung PDIA yang hancur akibat gempa dan tsunami”. Gedung tersebut yang dibangun kembali di atas lahan bangunan PDIA yang lama sedikit lebih luas daripada gedung sebelumnya. Luas yang dimiliki gedung tersebut yaitu $1096 \text{ m}^2 \times 834 \text{ m}^2$. Gedung tersebut memiliki ruangan yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan gedung sebelumnya namun dengan sedikit penambahan yaitu perluasan ruangan serta ditambahnya bangunan lantai dua.

Pada artikel Kerangka Acuan Kegiatan Seminar PDIA yang dikeluarkan tahun (2015), dijelaskan bahwa “Tiga tahun kemudian tepatnya tahun 2011, gedung PDIA dimanfaatkan untuk sementara searah bersama yaitu dengan

⁴⁰Wawancara dengan Drs. Rusdi Sufi, Pimpinan Kherkhof (mantan pimpinan PDIA), 02 November 2016

Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Bagian depan gedung digunakan oleh PDIA sementara bagian belakang termasuk lantai dua digunakan oleh Program studi Kedokteran Gigi dan Mulut Unsyiah untuk ruang kuliah dan praktek kepaniteraan mahasiswa kurang lebih tahun 2011 hingga 2013, karena pertengahan Juni 2014, berdasarkan surat Gubernur Aceh No. 590/13453 tanggal 25 April 2014, gedung PDIA di alih fungsikan untuk menjadi Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Unsyiah, sementara PDIA dipindahkan oleh Gubernur ke kompleks Museum Aceh, Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah, tepatnya di salah satu ruangan ($11 \times 11 \text{m}^2$) di lantai dua sisi sebelah kanan Rumoh Aceh”

b) Kepegawaian

Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) pada awalnya berlokasi di Jl. Prof. Majid Ibrahim, di sekitar Blang Padang (Desa Arafah), Banda Aceh. Namun, sekarang PDIA berlokasi di Jl. Sultan Alaidin Mahmud Syah, kompleks Museum Aceh, Banda Aceh. PDIA adalah badan yang bersifat mandiri sebagai salah satu perwujudan kerjasama antara Pemerintah Daerah Istimewa Aceh dengan Universitas Syiah Kuala. (Pasal-1, Bab 1 Statuta PDIA). PDIA mendapat bimbingan administratif dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh serta bimbingan teknis ilmiah dari Rektor Universitas Syiah Kuala dan kedua pejabat tersebut merupakan unsur pimpinan tertinggi PDIA.

Pemerintah Daerah Aceh dan pihak Universitas Syiah Kuala terus melakukan usaha-usaha untuk memajukan ilmu pengetahuan dan menjaga sejarah Aceh yang diwujudkan melalui lembaga informasi ini. Salah satu perwujudan dan kerjasamanya adalah dengan melakukan beberapa perubahan penting di dalam

lembaga. Pada tahun 1978 atau setahun setelah diresmikan pada tanggal 26 Maret 1977, perubahan yang dilakukan di antaranya menjadikan PDIA yang sebelumnya begitu khusus hanya untuk orang-orang yang melakukan penelitian kini pemakaiannya dibuka untuk umum agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga ini, yaitu menjadi *Institut of Achehnese Studies* atau *Atjeh Instituut* atau lebih tepatnya bertujuan untuk memajukan studi tentang Aceh dalam kedudukan dan hubungannya di wilayah nusantara dan mancanegara pada masa lalu, sekarang, serta masa depan.

Peresmian itu dilakukan tepat pada tanggal 3 September 1978 sekaligus memperingati hari jadi berdirinya Universitas Syiah Kuala ke XVI (enam belas) yang menjadi pusat pendidikan di Aceh pasca kemerdekaan Indonesia. Sehubungan dengan itu, perubahan nama juga dilakukan oleh lembaga ini pada acara peresmian tersebut, jika sebelumnya lembaga ini bernama PDIA, maka saat itu telah menjadi PDIA.

Perubahan atau penambahan yang dilakukan pada nama PDIA menjadi PDIA diharapkan agar masyarakat bisa menjadikan lembaga ini sebagai tempat untuk belajar dan menambah wawasan berupa ilmu pengetahuan mengenai Aceh, yang informasinya bersumber dari dokumen-dokumen peninggalan sejarah. Orang yang ditunjuk dan dipercayai sebagai pemimpin atau direktur dari lembaga PDIA adalah Drs. Teuku Ibrahim Alfian, M.A. Kemudian setelah meninggal Teuku Ibrahim Alfian digantikan oleh Aboe bakar dan seterusnya digantikan kepala – kepala PDIA yang lain setiap tahunnya.

Untuk melihat nama Direktur PDIA beserta jabatannya dan para tenaga kerja PDIA maka dibutuhkan data sejak berdirinya PDIA hingga sekarang. Untuk lebih jelas dapat dilihat di tabel 4.4

NO	Nama Direktur	Masa Jabatan	pegawai	Tenaga kontrak	Staff
1	Prof. Dr. Teuku Ibrahim Alfian, M.A	(1977-1978)	-	-	-
2	Aboe Bakar	(1979 -1986)	-	-	-
3	Drs. M. Adnan Hanafiah	(1987 -2006)	-	-	± 13
4	Drs. Rusdi Sufi	(2006 -2012)	2	12	-
	Dra. Zunaimar	(2013–2016)	4	1	-
6	Drs.Mawardi, M.HUM., M.A	(2016- sekarang)	1	12	-
Jumlah			7	39	± 13

Data diolah : 1 januari 2017

Penulis tidak berhasil mendapatkan keseluruhan data koleksi PDIA sejak tahun 1978-1998 Hal ini telah penulis konfirmasi kepada pegawai PDIA yang sudah lama bekerja di kantor PDIA. Menurut nya sebagian besar data tersebut sudah hilang ketika bencana gempa dan tsunami yang menimpa Aceh pada tahun 2004.

Maka jika dilihat dari tabel di atas, dari jumlah pegawai dan tenaga kontrak hanya terdiri dari beberapa staf karena disebabkan dana tidak mencukupi untuk membayar gaji pegawai dan tenaga kontrak. maka dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai PDIA 7 orang dan tenaga kontrak ada 39 orang dan pada masa Aboe Bakar ada 13 staf PDIA, pada masa aboe bakar belum

adanya pegawai dan tenaga kontrak hanya sebutan staf saja. Pembiayaan PDIA sampai dengan sekarang diperoleh dari sumber-sumber yaitu :

- Pemerintah Daerah Istimewa Aceh
- Universitas Syah Kuala,
- Sumbangan / bantuan yang tidak mengikat,

Usaha-usaha yang sah dilakukan sendiri oleh PDIA, Pembiayaan PDIA sampai dengan sekarang ditanggung oleh pemerintah Aceh (Gubernur Aceh) selama tiga tahun terakhir (2013, 2014 dan 2016). Dana bantuan yang dialokasikan untuk PDIA tidak lebih dari Rp.500.000.000.00(Lima ratus juta rupiah). Dana tersebut hanya mampu untuk membayar honor para penyelenggara (staf) PDIA. Keterbatasan dalam bantuan dana disebabkan PDIA masih merupakan lembaga kerjasama (bukan sepenuhnya berada dibawah Pemerintah Aceh). Sedangkan PDIA sangat memerlukan dana untuk keperluan lainnya, seperti pemeliharaan buku, dokumen, dan biaya operasional dan lain-lain.

Maka, dilihat dari tabel di atas pada tahun 1977-1986 data sudah hilang akibat bencana gempa dan Tsunami yang menimpa Aceh sehingga dokumen yang ada di PDIA juga terbawa air. Pada tahun 1987-2006. PDIA memiliki 13 orang tenaga penyelenggara yang terdiri satu orang direktur, empat staf tata usaha, satustaf sekretaris, satu staf bendahara. Bidang dokumentasi : satu kepala bidang dokumentasi (dibantu oleh satu orang staf). Bidang informasi: kepala bidang informasi (dibantu oleh dua orang staf). Bidang publikasi dan reproduksi : kepala bidang publikasi dan reproduksi (dibantu oleh satu orang staf). Pada tahun 2006 -

2012 ada 14 orang tenaga penyelenggara yang terdiri dari direktur, sekretaris, ktu. Bidang publikasi : kepala bidang publikasi dan sepuluh orang staf dan dua *cleaning serveice*).

Kemudian dari tahun 2013 – 2016 PDIA memiliki 19 orang tenaga penyelenggara yang terdiri dari direktur, kepala tata usaha (dibantu oleh bendahara dan satu staf umum). Bidang dokumentasi: kepala bidang dokumentasi (dibantu oleh dua orang staf). Bidang informasi: kepala bidang informasi (dibantu oleh dua orang staf). Bidang publikasi: kepala bidang publikasi (dibantu oleh dua orang staf). Bidang digitalisasi dan Otomasi: kepala bidang otomasi dan digitalisasi (dibantu oleh dua orang staf serta satu orang tenaga pengaman, dan satu orang cleaning service).



BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup dalam bagian ini penulis memberikan suatu kesimpulan dan saran yang merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa eksistensi PDIA sebagai berikut:

Sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya diketahui bahwa provinsi Aceh memiliki banyak peninggalan sejarah dan penyumbang khazanah manuskrip terbesar dalam dunia pernaskahan, memiliki sejarah yang demikian panjang dan menyisakan banyak tinggalan-tinggalan baik dari arkeologis, karya-karya sejarah(naskah dan manuskrip) yang masih tersebar ditengah masyarakat Aceh hingga saat ini masih diupayakan pelestariannya. Di samping kesadaran sejarah yang semakin menebal maka sumber-sumber informasi yang sudah terkumpul disediakan tempat khusus untuk disimpan pada lembaga-lembaga atau institusi resmi milik pemerintah maupun swasta untuk menjaga kemandirian dan keotentikan dokumen bersejarah. PDIA merupakan salah satu lembaga /institusi tempat penyimpanan dokumen-dokumen bersejarah yang ada di wilayah Aceh. Beberapa upaya yang dilakukan pelestarian dokumen-dokumen bersejarah yaitu:

1. Eksistensi PDIA Dalam Pelestarian Sumber Sejarah Aceh

Sumber sejarah Aceh yang dilestarikan terdiri dari: dokumen-dokumen klasik yang berusia 50 tahun lebih (atau mewakili suatu zaman/era) memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan agama. Jenis bahan yang digunakan untuk penulisan dokumen klasik beragam dan mudah rusak. Penyebab kerusakan dokumen di antaranya disebabkan kerusakan internal oleh unsur-unsur dari kertas dokumen (tinta dan pasta atau lem yang digunakan), keasaman dan cahaya, polusi udara, bencana alam dan manusia.

Mengingat dokumen atau naskah tidak dapat bertahan ratusan tahun tanpa pemeliharaan yang cermat dan perawatan khusus, pemeliharaan dilakukan dengan cara mengatur suhu tempat penyimpanan naskah agar tidak mudah lapuk, membersihkan dokumen dari kotoran dan debu menggunakan kuas, melapisi dengan kertas khusus dan menyemprot dokumen dengan bahan kimia. Tahap selanjutnya naskah yang sudah dikonversi kemudian ditata ulang dimasukkan ke dalam amplop disertai juga bahan pengawet alami seperti cengkeh dan lada, pelestarian bentuk digitalisasi juga dilakukan.

2. Respon Masyarakat dan Pemerintah Aceh dalam Upaya Pelestarian Sumber Sejarah Aceh

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa respon masyarakat dan pemerintah mengalami kemajuan yang tidak terlalu signifikan setiap tahunnya. Hal ini bisa disebabkan oleh pembangunan sarana dan pra sarana yang belum memadai, terlebih sejak peristiwa tsunami pada

tahun 2004 silam PDIA sampai saat ini belum memiliki gedung sendiri bahkan tidak cukup untuk menyimpan koleksinya yang sebagian juga ikut hilang pada peristiwa tsunami.

Masyarakat juga ikut merasakan dampaknya, di antaranya perkembangan dari segi pustaka tidak mengalami perkembangan hanya koleksi manuskrip digital yang mengalami perkembangan signifikan. Pengunjung berharap PDIA agar memperbanyak buku-buku koleksi dokumentasi dan agar segera mendapatkan gedung baru.

B. Saran

Diharapkan pemerintah agar segera membantu pembangunan sarana dan pra sarana PDIA sebagaimana gedung PDIA pertama kali dibangun dengan fasilitas yang bagus agar menjadi sebuah instansi layak yang memberikan informasi kepada masyarakat.

Diharapkan kepada segenap masyarakat agar memperhatikan dan bekerja sama dalam menjaga keberadaan naskah PDIA.

Diharapkan kepada mahasiswa/I fakultas Adab dan Humaniora yang mengambil jurusan Sejarah Kebudayaan Islam agar lebih memperhatikan PDIA sebagai salah satu lembaga yang menjadi sumber penting tulisan-tulisan, naskah dan sejarah Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel PDIA, *Testimoni Saksi Sejarah PDIA: PDIA Mencari Masa Depan*, Banda Aceh 2015.

Dinas kebudayaan dan pariwisata Aceh, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher .2008.

H. Edwar Djamaris, *Metode Penelitian Filologi*, Djakarta, CV Manasco, 2002.

Mulyati Tahir, "naskah kuno merupakan Sumber Sejarah dan Ilmu Pengetahuan" Dalam *Buletin Triulan*, Diponegoro: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Museum Negeri Povinsi Kaltin "Mulawarma," 1996).

Muin Umar dkk, *identifikasi Naskah,koleksi museum Negeri Banda Aceh*, Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1980).

M. Adril Septian,Skripsi *Perkembangan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA)*, Universitas Syiah Kuala.

Rabiatur addawiyah,"Pelestarian Arsip" Triwulanan, januari-maret 2012.

Rusdi Sufi, PDIA (Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh) Sebagai Tempat Penyimpanan Sumber Sejarah dan Budaya Aceh.

Statuta Pusat Dokumentasi Dan Informasi, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh Banda Aceh.

Thamrin & Mulyana, Edy. *Perpustakaan di Aceh Sepanjang Masa*. Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 2011

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Cet 2-3 Jakarta : Balai Pustaka, 2002.

Uka tjandrassa, *kajian naskah-naskah klasik dan peneapannnya bagi kajian sejarah islam di indonesia*, Jakarta : puslitbang lektur keagamaan, 2006.

FOTO-FOTO WAWANCARA



wawancara dengan bapak Drs Rusdi Sufi, mantan pimpinan PDIA



Foto wawancara dengan bapak Drs. Nurdin AR, pimpinan Museum Aceh



wawancara dengan Fahmianan Nova P staf PDIA bidang Perpustakaan



Foto wawancara dengan staff PDIA bidang pelayanan Informasi